



**CRITICAL ECOSYSTEM
PARTNERSHIP FUND**



**PROYEK
PELESTARIAN HUTAN LINDUNG SAHENDARUMANG
UNTUK KONSERVASI JENIS TERANCAM PUNAH DAN MENDORONG
PENGELOLAAN JASA LINGKUNGAN SECARA BERKELANJUTAN**

OLEH:

PERKUMPULAN SAMPIRI



**LAPORAN AKHIR PROYEK
MEI 2017 – SEPTEMBER 2018**

Proyek
Pelestarian Hutan Lindung Sahendarumang
Untuk Konservasi Jenis Terancam Punah Dan Mendorong Pengelolaan Jasa Lingkungan
Secara Berkelanjutan

Dilaksanakan oleh:

Perkumpulan Sampiri



Didukung oleh:

Burung Indonesia dan CEPF



DAFTAR ISI

Cover	
Daftar Isi	i
Ucapan Terima Kasih	ii
Bagian Pertama LAPORAN PROYEK	
I. Informasi Proyek	1
II. Ringkasan	7
III. Proses dan Capaian	15
IV. Perubahan	105
V. Pembelajaran	108
Bagian Kedua LAPORAN KEUANGAN	
VI. Status Keuangan	110

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan terlaksananya dan tercapainya indikator-indikator dari tujuan Proyek Pelestarian Hutan Lindung Sahendarumang Untuk Konservasi Jenis Terancam Punah Dan Mendorong Pengelolaan Jasa Lingkungan Secara Berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Sangihe, maka Perkumpulan Sampiri, menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang telah mengapresiasi pelaksanaan-pelaksanaan kegiatan proyek utamanya pengembangan kegiatan permakultur dan menjadikan salah satu kampung dampingan proyek menjadi rujukan bagi Dinas Pertanian dan dinas terkait lainnya, serta kampung-kampung untuk belajar pengelolaan permakultur sebagai salah satu alternatif pengembangan pertanian secara mandiri dan berkelanjutan. Serta telah mendukung penegasan hasil pendataan kawasan hutan lindung Sahendarumang dan deklarasi komitmen pemerintah kampung yang beririsan dengan Sahendarumang untuk melestarikan hutan lindung Sahendarumang.
2. Burung Indonesia, sebagai mitra utama pelaksanaan proyek melalui Tim Pelaksana, yang telah banyak membantu teknis pelaksanaan dan pencapaian proyek, serta pendampingan manajemen proyek, dan kemudahan dalam akses administrasi keuangan dan sumber daya.
3. Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF), sebagai penyandang dana pelaksanaan program, sehingga dapat membantu ketersediaan dana dan pengelolaan sumber daya proyek.
4. Mitra Wallacea, yang tersebar di seluruh wilayah lokasi program kemitraan Wallacea, yang telah membantu berbagi pengalaman dan sukses dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan di lokasi kerja masing-masing.
5. Yayasan Penabulu, yang telah banyak membantu dalam peningkatan kapasitas kelembagaan dan pengelolaan sumber daya lembaga.
6. Yayasan IDEP, yang telah membantu peningkatan kapasitas dalam hal pengenalan teknik Permakultur, dan telah menjadi salah satu kegiatan yang dapat mendorong lahirnya kebijakan regulasi pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
7. Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara, Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelola Hutan Lindung Wilayah III Sangihe Talaud dan Sitaro, selaku pemangku kawasan hutan lindung Sahendarumang, yang telah membantu secara teknis dan mengawal penguatan kebijakan pemerintah pusat, serta telah berpartisipasi bersama-sama dalam proyek dengan mengalokasikan staf dan tenaga lapangan.

8. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang telah banyak membantu fasilitasi dan kemudahan dalam hal koordinasi dengan lembaga teknis terkait, penyelenggaraan kegiatan di tingkat kabupaten, dan menyediakan fasilitas pemerintah untuk digunakan sebagai lokasi kegiatan proyek.
9. Pemerintah Kecamatan, yang telah membantu mengkoordinasikan kegiatan lintas kampung, dan ikut hadir bersama-sama dalam kegiatan ditingkat kabupaten.
10. Pemerintah Kampung, yang telah berpartisipasi dalam mendukung pelaksanaan kegiatan proyek dan sudah mulai mengakomodir hasil-hasil proyek diintegrasikan kedalam perencanaan kampung, dan mengalokasikan dana kampung menjadi pendukung berbagai kegiatan proyek di lapangan.
11. Masyarakat, lokasi proyek yang ikut terlibat secara aktif dalam kegiatan proyek, maupun yang mendukung pelaksanaan dalam program di kampung yang berhubungan dengan pelestarian hutan lindung Sahendarumang.
12. Pelaksana proyek, yang telah memberi kontribusi yang sangat luar biasa bagi pikiran, waktu, tenaga, dan sumber daya lain, sehingga kegiatan-kegiatan proyek dapat terlaksana dengan baik.

Hasil-hasil kegiatan yang telah dicapai melalui proyek ini adalah sumberdaya yang patut ditindaklanjuti dan dikembangkan lagi secara berkesinambungan, dengan sumberdaya lain yang dimiliki oleh semua stakeholder, sehingga tujuan jangka panjang proyek ini yakni Luas hutan primer dalam kawasan hutan lindung Sahendarumang dapat dipertahankan melalui pelaksanaan kesepakatan kampung, peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola SDA secara lestari dan berkelanjutan serta dukungan kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, dapat terwujud.

Koordinator Proyek

Bagian Pertama
LAPORAN PROYEK

I. INFORMASI PROYEK

a. Ringkasan Proyek

Wilayah Pendanaan	:	Sangihe Talaud dan Koridor Laut Sulawesi Utara
KBA	:	Sahendarumang
Strategic Direction(s)	:	2. Perlindungan Tapak Hutan Lindung Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor:734/Menhut/II/Tahun 2014 Tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sulawesi Utara, seluas 3.487,818 Ha
Nama Proyek	:	Pelestarian Hutan Lindung Sahendarumang Untuk Konservasi Jenis Terancam Punah Dan Mendorong Pengelolaan Jasa Lingkungan Secara Berkelanjutan
Nomor Laporan	:	3 (tiga)
Periode waktu	:	Mei 2017 – Juli 2018 (15 bulan)
Disampaikan oleh	:	Samsared B. Barahama (Koordinator Proyek)
Tanggal	:	19 Desember 2018
Hibah CEPF	:	(a) dalam USD : 15.125 (b) dalam mata uang lokal (Rp) : 199.655.000
Kontribusi Mitra	:	
Periode proyek	:	1 Mei 2017 – 30 April 2018 (12 bulan) 1 Mei – 31 Juli 2018 (3 bulan diperpanjang) 1 Agustus – 20 Desember 2018 (penyelesaian kegiatan dan laporan)
Lembaga Pelaksana	:	Perkumpulan Sampiri

b. Latar Belakang

Penetapan Kawasan Hutan Lindung Sahendarumang

Pada tahun 1999, kawasan Sahendarumang ditetapkan menjadi kawasan Hutan Lindung melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 452/Kpts-II/1999, dengan luas kawasan 3.549 hektar. Nilai-nilai penting mengapa Sahendarumang ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung antara lain yaitu nilai keragaman hayati yang sangat tinggi dimana dalam kawasan hutan Sahendarumang hidup 6 (enam) jenis burung khas Sangihe yaitu *Otus collari*, *Aethopyga duyvenbodei*, *Loriculus catamene*, *colluricincla sanghirensis*, *Eutrichomyias rowleyi* dan *Zosterops nehrkorni*. 3 (tiga) jenis diantaranya terancam punah secara global (pada kategori kritis menurut catatan IUCN) yaitu *colluricincla sanghirensis*, *Eutrichomyias rowleyi* dan *Zosterops nehrkorni*. Fungsi kawasan Sahendarumang sebagai sistem penyangga kehidupan, baik itu daerah tangkapan air, pencegah erosi karena kondisi tanah dan geologinya yang labil, dan pengatur suhu dan iklim di kepulauan Sangihe.

Penetapan Kawasan Hutan Lindung Sahendarumang pada tahun 1999 ini, kemungkinan besar bukanlah hutan, karena tidak ada data pembandingan sebelum itu. Kawasan Hutan Lindung Sahendarumang meliputi wilayah Kecamatan Manganitu, Tamako, Manganitu Selatan, Tabukan Selatan dan Tabukan Tengah.

Pada tahun 2001-2005 Birdlife Indonesia (Burung Indonesia 2002) salah satu lembaga konservasi di Indonesia bersama Yayasan Sampiri lembaga konservasi lokal yang berkedudukan di Tahuna melaksanakan program “Konservasi Hutan Kunci Sahendarumang”. Dari program ini telah terpetakan kawasan Hutan Lindung Sahendarumang terdiri dari kawasan hutan primer dan sekunder yang terbatas pada bagian puncak pegunungan Sahendrumang dan lereng-lereng bukit yang terjal, kawasan lahan pertanian dan kawasan pemukiman.

Ancaman terhadap Eksistensi Kawasan Hutan Lindung Sahendarumang

Menurut data survey Burung Indonesia 2001-2005 diketahui luas hutan primer kawasan hutan lindung Sahendarumang tersisa 350-500 ha, angka ini sama dengan 10% dari luas hutan lindung Sahendrumang yang ditetapkan sebesar 3.549 hektar. Merujuk pada perhitungan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa saat ini Kawasan Hutan Lindung Sahendarumang sedang terancam dan mengalami tekanan, yang menyebabkan

luas kawasan lindung semakin berkurang. Perubahan tersebut terlihat dari pengamatan Sampiri yang dilakukan tahun 2015-2016 di kampung Malamenggu, Bukide, Pelelengen dan Lelipang, Walaupun belum diketahui berapa luas hutan yang terbuka dengan adanya lahan-lahan baru dalam kawasan hutan, namun telah mengindikasikan telah terjadi penurunan luas hutan. Sejak penelitian yang dilakukan Burung Indonesia (2001-2005), sampai sekarang belum ada data yang jelas seberapa besar hamparan tutupan hutan Sahendrumang yang tersisa.

Jika kondisi ini terus berlangsung maka luas hutan lindung akan semakin berkurang dan memberi berdampak pada habitat satwa endemik (burung dan satwa lain), dimana habitat akan semakin kecil yang secara langsung akan mengakibatkan tekanan terhadap populasi satwa khususnya satwa yang sangat tergantung pada ekosistem hutan. Berkurangnya tutupan hutan akan berdampak pada menurunnya kemampuan daerah tangkapan air yang secara langsung mengancam kehidupan ekosistem sungai. Berkurangnya sumber air akan mempengaruhi ketersediaan air bagi pemenuhan kebutuhan air masyarakat untuk pertanian dan kebutuhan hidup berkurang. Ketika tutupan hutan terbuka maka walaupun kecil akan mengakibatkan suhu dan iklim pulau Sangihe berubah karena berkurangnya tumbuhan yang dapat membantu menstabilkan suhu dan iklim lokal.

Penyebab masalah

Sejak awal dilakukannya penetapan batas yang ditandai dengan pemasangan patok batas hutan lindung, telah terjadi penolakan besar-besaran di hampir semua kampung yang bersinggungan dengan kawasan hutan lindung Sahendarumang. Penolakan ini terjadi disebabkan karena tidak dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat tentang hutan lindung. Sampai sekarang, di beberapa kampung sangat sensitif jika berbicara tentang patok batas hutan lindung. Sebagian besar masyarakat di kampung yang berbatasan dengan hutan lindung Sahendrumang sudah memahami tentang pentingnya kawasan hutan lindung, namun masih ada yang perlu dibangun kesadaran dan ditingkatkan pengetahuannya tentang pentingnya kawasan hutan lindung. Pembukaan lahan untuk pertanian dan perkebunan menjadi fenomena dibanyak tempat. Kebutuhan lahan pertanian dan perkebunan menjadi ancaman bagi eksistensi kawasan hutan lindung. Kebijakan pemerintah dibidang pertanian dengan program perluasan lahan pertanian sampai ke dalam kawasan hutan lindung menjadi ancaman serius terhadap

regulasi pemerintah itu sendiri. Koordinasi yang kurang dan tidak sinkronnya kebijakan dan program sering menimbulkan tumpang tindih kepentingan dan terkadang kepentingan itu tidak berpihak pada perlindungan hutan Sahendarumang.

c. Tujuan, Keluaran, dan Kegiatan

- Tujuan jangka panjang

Mewujudkan kawasan Hutan Lindung Sahendarumang , yang mendukung pelestarian karagaman hayati dan keberlanjutan jasa lingkungan.

- Tujuan

Luas hutan primer dalam kawasan hutan lindung Sahendarumang dapat dipertahankan melalui pelaksanaan kesepakatan kampung, peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola SDA secara lestari dan berkelanjutan serta dukungan kebijakan dari Pemerintah Kabupaten.

- Keluaran

1. Pemerintah dan masyarakat kampung merumuskan dan melaksanakan kesepakatan kampung dalam mengelola SDA didukung kebijakan pemerintah Kabupaten.

2. Demplot pengelolaan sumber daya alam.

- Kegiatan

- 1.1. Survey tutupan hutan dalam kawasan hutan lindung Sahendarumang

- 1.2. Diskusi kampung untuk implementasi pengelolaan SDA

- 1.3. Pengkajian kampung secara partisipatif

- 1.4. Perumusan Kesepakatan Kampung

- 1.5. Pelatihan dan pendampingan kelompok pengelola ruang kampung

- 1.6. Serial pertemuan dan diskusi para pihak di tingkat kabupaten

- 2.1 Pelatihan kelompok masyarakat dalam mengelola SDA

- 2.2 Pembuatan demplot permakultur

d. Waktu Pelaksanaan

Proyek dilaksanakan dalam 3 (tiga) kurun waktu, yaitu:

1. Periode 1 Mei 2017 – 30 April 2018, yaitu selama 12 bulan sesuai dengan masa perjanjian kontrak kerjasama.

2. Periode 1 Mei – 31 Juli 2018, yaitu selama 3 bulan yakni masa perpanjangan perjanjian kontrak kerjasama.

3. Periode 1 Agustus – 20 Desember 2018, 5 bulan yakni masa diluar perjanjian kerjasama untuk menyelesaikan kegiatan dan laporan.

e. Pelaksana

Program akan dilaksanakan oleh Perkumpulan Sampiri, yaitu NGO lokal di Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang didirikan tanggal 24 Agustus 2015, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 12 Tahun 2015, dan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Sampiri Nomor 12 Tahun 2017, yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0010055.AH.01.07 Tahun 2017.

f. Lokasi Proyek

Proyek dilaksanakan di kecamatan dan kampung yang berada disekitar Sahendarumang dan di Tahuna ibu kota Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Kecamatan	Kampung
Tahuna	Tahuna
Manganitu	Taloarane 1 Hiung Pinabentengang Karatung 1 Karatung 2 Kauhis Sesiwung Lebo Belengang Barangkalang
Tamako	Nagha 1 Nagha 2 Binala Ulung Peliang Lelipang Menggawa 1

	Dagho
Manganitu Selatan	Pindang
Tabukan Selatan	Malamenggu Bukide
Tabukan Tengah	Bowongkali Kulur 1 Kulur 2 Bira Pelelangeng Miulu

g. Mitra Kerja

Perkumpulan Sampiri melaksanakan proyek bermitra dengan berbagai pihak yaitu Burung Indonesia, Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF), Mitra Wallacea, Yayasan Penabulu, Yayasan IDEP, Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara, Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelola Hutan Lindung Wilayah III Sangihe Talaud dan Sitaro, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kampung, Masyarakat kampung lokasi.

h. Dukungan Proyek Lain

Dalam mencapai tujuan dan keluaran proyek, beberapa kegiatan didukung pula oleh Proyek Konservasi Burung Endemik Sangihe dengan Perlindungan Hutan Lindung Gunung Sahendarumang yang didanai Rainforest Trust.

II. RINGKASAN

Pelaksanaan kegiatan proyek Pelestarian Hutan Lindung Sahendarumang Untuk Konservasi Jenis Terancam Punah Dan Mendorong Pengelolaan Jasa Lingkungan Secara Berkelanjutan, pada dasarnya terlaksana secara keluruhan sesuai dengan perencanaan awal. Beberapa keluaran dan target proyek dapat dicapai, ditinjau dari tujuan, keluaran, indikator dan asumsi proyek. Bahkan sudah diperoleh dampak hasil pelaksanaan proyek.

Tujuan proyek adalah. Luas hutan primer dalam kawasan hutan lindung Sahendarumang dapat dipertahankan melalui pelaksanaan kesepakatan kampung, peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola SDA secara lestari dan berkelanjutan serta dukung kebijakan dari Pemerintah Kabupaten.

Beberapa capaian penting yang dihasilkan dari proyek ini ditinjau dari keluaran proyek, yaitu:

Keluaran Proyek	Capaian Keluaran	Dampak
Pemerintah dan masyarakat kampung merumuskan dan melaksanakan kesepakatan kampung dalam mengelola SDA didukung kebijakan pemerintah kabupaten	<ol style="list-style-type: none"> Diperolehnya data kondisi aktual dilapangan kawasan hutan lindung Sahendarumang yang ditetapkan dengan SK MenHut RI No. 734/2014, yaitu sebesar 3.487,820 hektar. Diperolehnya data wilayah administrasi 22 kampung di sekitar Sahendarumang yang didalamnya terdapat kawasan hutan lindung. Hasil survey diterima oleh pemerintah kampung dan pemerintah daerah kabupaten dan pemerintah 	<ol style="list-style-type: none"> Peta wilayah adminstrasi kampung menjadi referensi kampung dalam mengisi data profil kampung. Terbangun kerjasama kemitraan antara Perkumpulan Sampiri dan Burung Indonesia dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara UPTD KPHL Wilayah III Sangihe Talaud Sitaro. Hasil pendataan kawasan hutan lindung Sahendarumang berbasis kampung yang dilakukan secara partisipatif menjadi

	<p>daerah propinsi.</p> <p>4. Pengelolaan dan pelestarian kawasan hutan lindung Sahendarumang masuk dalam RPJM Kampung Malamenggu, Bukide dan Pelelangeng.</p> <p>5. Kelompok “Tasumaro” dikampung Bukide dilatih menjadi satu kelompok mandiri dapat menjadi mitra pemerintah kampung mendampingi program pengelolaan sumber daya alam kampung.</p>	<p>bahan bagi KPHL Wilayah III untuk mengajukan skema pengelolaan perhutanan sosial kepada pemerintah pusat untuk mengakomodir pengelolaan kawasan hutan yang sekarang ini sudah dikelola oleh masyarakat.</p> <p>4. Hasil pendataan kawasan hutan lindung Sahendarumang menjadi referensi bagi KPHL Wilayah III untuk mengembangkan program di kawasan hutan lindung Sahendarumang.</p> <p>5. Hasil pendataan kawasan hutan lindung Sahendarumang dan penataan wilayah administrasi kampung menjadi referensi bagi Dinas dan Badan terkait untuk perencanaan wilayah dan revisi perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe.</p> <p>6. Konflik tata batas hutan lindung Sahendarumang</p>
--	--	---

		<p>mulai dapat diatasi dengan pelibatan pemerintah dan masyarakat kampung dalam kegiatan pendataan kawasan hutan lindung Sahendarumang dan penataan wilayah administrasi kampung.</p>
<p>Terbangunnya demplot pengelolaan sumber daya alam</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat diperkenalkannya teknik pertanian Permakultur bagi 4 kelompok masyarakat di Kampung Malamenggu, Bukide, dan Pelelangeng. 2. Terbangunnya 4 demplot permakultur di Kampung Malamenggu, Bukide, Pelelangeng dan Kulur 1. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe mendeklarasikan Kabupaten Sangihe sebagai Kabupaten Organik. 2. Dikeluarkannya Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengembangan Pertanian Organik di Kabupaten Kepulauan Sangihe. 3. Diperolehnya Pengakuan dari Pemerintah Pusat dengan memberikan penghargaan Kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang mempunyai komitmen positif untuk pengembangan komoditas perkebunan berkelanjutan. 4. Bupati Kepulauan Sangihe memberikan rekomendasi

		<p>kepada dinas teknis, penyuluh pertanian, dan kampung lain untuk belajar di Kampung Bukide tentang Teknik Pertanian Permakultur.</p> <p>5. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui Dinas Pertanian memberikan penghargaan dalam bentuk insentif peralatan kepada kelompok ‘Tasumaro’ Kampung Bukide untuk mengembangkan demplot Permakultur.</p> <p>6. BUM Kampung Kulur 1 membangun rumah produksi pupuk organik hayati, sebagai bagian semangat melanjutkan praktek pertanian permakultur.</p>
--	--	---

Capaian-capaian setiap kegiatan, diuraikan sebagai berikut:

Kegiatan	Capaian Kegiatan
Survey tutupan hutan dalam kawasan hutan lindung Sahendarumang	Pendataan kawasan hutan lindung Sahendarumang menghasilkan kesesuaian data peta kawasan hutan lindung Sahendarumang yang ditetapkan dengan SK MenHut RI No. 734/2014, yaitu sebesar 3.487,820 hektar dengan data hasil

	<p>pendataan partisipatif, yang dapat ditunjukkan dengan peta partisipatif hasil pengolahan data.</p>
<p>Diskusi kampung untuk implementasi pengelolaan SDA</p>	<p>Program Pelestarian hutan lindung Sahendarumang masuk dalam RPJM Kampung Malamenggu, Bukide, dan Pelelangeng, dan diakomodir dalam Rencana Kerja Pemerintah kampung.</p>
<p>Pengkajian kampung secara partisipatif</p>	<p>Diperoleh data hasil pengkajian kampung Kulur 1.</p>
<p>Perumusan Kesepakatan Kampung</p>	
<p>Pelatihan dan pendampingan kelompok pengelola ruang kampung</p>	<p>Kelompok “Tasumaro” di Kampung Bukide sudah dilatih dan memiliki rencana kerja dan diakomodir oleh pemerintah kampung masuk dalam perencanaan pembangunan kampung.</p>
<p>Serial pertemuan dan diskusi para pihak di tingkat kabupaten</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen kerjasama antara Perkumpulan Sampiri dengan KPHL Wilayah III tentang untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka membangun kesepahaman pengelolaan kawasan hutan lindung Sahendarumang, dan pelaksanaan kegiatan pendataan kawasan hutan lindung Sahendarumang. 2. Kesepahaman para pemangku kepentingan dalam pengelolaan hutan lindung Sahendarumang, dan dukungan pemerintah kabupaten, kecamatan, dan kampung dalam kegiatan pendataan kawasan hutan lindung Sahendarumang dan penataan wilayah administrasi kampung. 3. Deklarasi komitmen pemerintah kampung

	mewakili masyarakat kampung untuk melestarikan hutan lindung Sahendarumang, dan mengintegrasikannya dalam rencana pembangunan kampung.
Pelatihan kelompok masyarakat dalam mengelola SDA	Terdapat 4 kelompok masyarakat di kampung Malamenggu, Bukide, Pelelangang, dan Kulur 1, yang dapat mempraktekan teknik pertanian permakultur.
Pembuatan demplot permakultur	Terbentuk demplot permakultur di Kampung Malamenggu, Bukide, Pelelangeng, dan Kulur 1.

Pelaksanaan proyek ini pun dibangun berdasarkan asumsi-asumsi awal untuk menjamin keluaran dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan hasil yang baik. Setelah melalui masa pelaksanaan proyek, dapat dievaluasi asumsi-asumsi yang sangat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan kegiatan sebagai berikut:

Asumsi Awal	Kondisi saat Implementasi Proyek
Peraturan Kampung Tentang Tata Kelola Ruang Kampung tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tata ruang wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe mendukung.	Peraturan Kampung Tentang Tata Kelola Ruang Kampung tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tata ruang wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe mendukung.
Pemerintah menggalakan program pemanfaatan lahan tidur di lahan pertanian diluar kawasan hutan dan lahan disekitar permukiman	Belum terlihat program pemerintah yang menggalakan pemanfaatan lahan tidur di lahan pertanian diluar kawasan hutan dan lahan disekitar permukiman
Situasi dan iklim politik di kampung kondusif	Situasi dan iklim politik di kampung Kulur 1 tidak kondusif menyebabkan proses perumusan kesepakatan kampung tidak dapat dilaksanakan.

Pemerintah kampung proaktif mendampingi dan memfasilitasi program pengelolaan SDA.	Pemerintah kampung proaktif mendampingi dan memfasilitasi program pengelolaan SDA.
Ada dukungan politis dari pemerintah kabupaten dalam mendukung pengelolaan kawasan hutan lindung	Ada dukungan politis dari pemerintah kabupaten dalam mendukung pengelolaan kawasan hutan lindung
Pemerintah kecamatan memberikan respon positif bagi program pelestarian hutan lindung Sahendarumang Sahendarumang	Pemerintah kecamatan memberikan respon positif bagi program pelestarian hutan lindung Sahendarumang Sahendarumang
Pemerintah dan masyarakat mendukung pelaksanaan survey hutan	Pemerintah dan masyarakat mendukung pelaksanaan survey hutan
Hasil survey tutupan lahan diterima oleh pemerintah kabupaten, kecamatan dan kampung	Hasil survey tutupan lahan diterima oleh pemerintah kabupaten, kecamatan dan kampung
Pemerintah kampung dan masyarakat memiliki motivasi yang kuat untuk memasukan kegiatan pengelolaan SDA ke dalam perencanaan pembangunan kampung	Pemerintah kampung dan masyarakat memiliki motivasi yang kuat untuk memasukan kegiatan pengelolaan SDA ke dalam perencanaan pembangunan kampung
Ada kesepakatan batas kampung dengan kampung tetangga	Masih terdapat konflik batas antar kampung
Perangkat dan Program pengolah data pemetaan memadai	Perangkat dan Program pengolah data pemetaan memadai
Pengurus dan anggota kelompok yang solit dan memiliki motivasi untuk mengelola SDA dengan baik	Pengurus dan anggota kelompok belum solit dan motivasi untuk mengelola SDA dengan baik belum nampak
Pemerintah kabupaten dan kecamatan memiliki komitmen yang besar dan peduli terhadap pelestarian lingkungan hidup, terutama kawasan hutan Sahendarumang	Pemerintah kabupaten dan kecamatan memiliki komitmen yang besar dan peduli terhadap pelestarian lingkungan hidup, terutama kawasan hutan Sahendarumang
Tingginya partisipasi masyarakat laki-laki dan perempuan dalam proses pengkajian SDA kampung	Tingginya partisipasi masyarakat laki-laki dan perempuan dalam proses pengkajian SDA kampung

Pemerintah kampung mendukung pengelolaan kelompok	Pemerintah kampung mendukung pengelolaan kelompok
---	---

Capaian proyek sangat mendukung pencapaian tujuan jangka panjang yaitu mewujudkan kawasan hutan lindung Sahendarumang, yang mendukung pelestarian karagaman hayati dan keberlanjutan jasa lingkungan. Karena hasil-hasil dan dampak proyek dapat dijadikan acuan bagi pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe maupun pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam membuat kebijakan-kebijakan program maupun kebijakan regulasi dan perijinan. Dari skema pengelolaan kawasan hutan lindung Sahendarumang yang disampaikan oleh KPHL Wilayah III bahwa kawasan hutan lindung yang beririsan dengan area pemanfaatan masyarakat akan dikelola dengan skema perhutanan social, ketika pemerintah pusat sudah mengeluarkan ijin kepada kelompok masyarakat pengelola kawasan hutan tentang pengelolaan kawasan hutan lindung Sahendarumang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pengelolaan kawasan hutan lindung, khususnya kawasan yang beririsan dengan daerah kelola masyarakat, dapat dikelola secara berkesinambungan oleh masyarakat, masyarakat dapat memperoleh hasilnya dari sisi ekonomi, sedagkan dari sisi ekologi, masyarakat dapat mempertahankan fungsi lindung dari kawasan lindung yang dikelolanya.

III. PROSES DAN CAPAIAN

A. Analisis capaian per indikator

Komponen	Indikator	Capaian Indikator	Kendala/Hambatan
<p>Goal (tujuan jangka panjang):</p> <p>Mewujudkan kawasan Hutan Lindung Sahandarumang , yang mendukung pelestarian karagaman hayati dan keberlanjutan jasa lingkungan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laju kerusakan habitat di KBA berkurang 50 % dibanding base-line. 2. KBA di luar kawasan konservasi berhasil di konservasi. 3. Ancaman terhadap jenis-jenis prioritas berkurang hingga pada tingkat yang tidak membahayakan pelestarian jenis-jenis tersebut. 4. Masyarakat adat dan atau lokal mendokumentasikan dan memetakan hak kelola mereka di sekitar KBA. 		

Komponen	Indikator	Capaian Indikator	Kendala/Hambatan
<p>Objective/outcome (tujuan proyek):</p> <p>Luas hutan primer dalam kawasan hutan lindung Sahendarumang dapat dipertahankan melalui pelaksanaan kesepakatan kampung, peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola SDA secara lestari dan berkelanjutan serta dukung kebijakan dari Pemerintah Kabupaten.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah dan masyarakat di 3 kampung melanjutkan aksi pelestarian kawasan hutan lindung. 2. Masyarakat di 3 kampung mengelola SDA dalam kawasan Sahendarumang secara bertanggung jawab dan berkelanjutan, serta tidak lagi membuka lahan pertanian baru di dalam kawasan hutan yang sudah disepakati 		
<p>Keluaran 1</p> <p>Pemerintah dan masyarakat kampung merumuskan dan melaksanakan kesepakatan kampung dalam mengelola SDA didukung kebijakan pemerintah Kabupaten</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1 desa memiliki kesepakatan tentang pengelolaan SDA. 2. 3 desa mengimplementasikan kesepakatan yang sudah dibuat dalam bentuk rencana operasional. 3. Pemerintah kabupaten membatasi perluasan lahan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kampung Kulur 1 belum memiliki kesepakatan tentang pengelolaan SDA. 2. Kampung Malamenggu, Bukide, dan Pelelangeng sudah mengintegrasikan program pelestarian hutan lindung Sahendaruang ke dalam RPJM Kampung dan RKP. 	

Komponen	Indikator	Capaian Indikator	Kendala/Hambatan
	pertanian.	3. Pemerintah Kabupaten mendeklarasikan Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai Kabupaten Organik. 4. Pemerintah Kabupaten mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengembangan Pertanian Organik di Kabupaten Kepulauan Sangihe.	
1.1 Survey tutupan hutan dalam kawasan hutan lindung Sahendarumang	1. Dilaksanakan 5 kali pertemuan di 5 kecamatan yang dihadiri oleh utusan pemerintah kampung dari 35 kampung disekitar Sahendarumang, 2. Survey tutupan lahan sudah dilaksanakan, data lapangan. 3. Pemerintah 35 kampung membantu pelaksanaan survey 4. Laporan hasil survey diterima dan diketahui pemerintah	1. Pertemuan di tingkat kecamatan dilaksanakan 3 kali yaitu di Kecamatan Manganitu, Tamako dan Tabukan Tengah, yang menghadirkan 5 kecamatan. 2. Telah dilakukan survey/pendataan kawasan hutan lindung Sahendarumang.	

Komponen	Indikator	Capaian Indikator	Kendala/Hambatan
	kabupaten, kecamatan dan kampung.	3. Pemerintah dan masyarakat 26 kampung berpartisipasi dalam pengambilan data hutan lindung dan penataan wilayah administrasi kampung. 4. Laporan hasil pendataan hutan lindung Sahendarumang dan penataan wilayah administrasi kampung diterima dan dijadikan reverensi oleh pemerintah kampung, instnasi teknis kabupaten, dan instansi teknis propinsi.	
1.2 Diskusi kampung untuk implementasi pengelolaan SDA	Diskusi yang dihadiri oleh 30 orang dan pendampingan di 3 kampung menghasikan inisiatif kegiatan pengelolaan SDA masuk dalam rencana program pemerintah kampung.	- Diskusi dilaksanakan di 3 kampung yaitu kampung Malamenggu, Bukide, dan Pelelangeng, dihadiri oleh 64 laki-laki dan 35 perempuan.	

Komponen	Indikator	Capaian Indikator	Kendala/Hambatan
		<ul style="list-style-type: none"> - Program pelestarian hutan lindung Sahendarumang diintegrasikan kedalam RPJM dan RKP Kampung. 	
1.3 Pengkajian kampung secara partisipatif	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi dan pertemuan dilaksanakan di 1 kampung diikuti sebanyak 50 orang masyarakat dan pemerintah kampung telah mengetahui, memahami tujuan dan sasaran proyek dan mendukung proyek yang akan dilaksanakan. 		
	<ul style="list-style-type: none"> - Pertemuan di dusun dan kampung sebanyak 7 kali pertemuan yang diikuti oleh 100 orang, dan diperoleh hasil pengkajian potensi, masalah, penyebab dan solusi di 1 kampung. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pertemuan di dusun dilaksanakan 4 kali dan dihadiri 26 laki-laki dan 35 perempuan. - Teridentifikasi inisiatif program kegiatan di 4 dusun. 	
1.4 Perumusan Kesepakatan Kampung	Kesepakatan pengelolaan SDA terbangun di 1 kampung.	Kesepakatan pengelolaan SDA Kampung Kulur 1 belum terbangun.	Ada dinamika politik di kampung yang menyebabkan terjadinya sumbatan komunikasi antara pelaksana proyek dengan

Komponen	Indikator	Capaian Indikator	Kendala/Hambatan
			pemerintah Kampung Kulur 1.
1.5 Pelatihan dan pendampingan kelompok pengelola ruang kampung	Pelatihan pengelolaan organisasi di 1 kelompok, sehingga setiap pengurus memahami tugas dan fungsinya dan dapat melaksanakan program kerja kelompok.	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan dilakukan kepada kelompok "Tasumaro" Kampung Bukide. - Telah dibangun dasar-dasar pembentukan kelompok. - Telah dirumuskan program kelompok, yang diakomodir dalam rencana pembangunan kampung. 	
1.6 Serial Pertemuan dan diskusi para pihak di tingkat kabupaten	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe mengetahui perkembangan program, saat 15 SKPD terkait menghadiri pertemuan yang dilaksanakan 3 kali.	<ul style="list-style-type: none"> - Pertemuan dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara. - Koordinasi dengan KPHL Wilayah III tentang program pelestarian hutan lindung Sahendarumang. - Koordinasi dengan KPHL Wilayah III tentang 	

Komponen	Indikator	Capaian Indikator	Kendala/Hambatan
		<p>pelaksanaan workshop membangun kesepahaman pengelolaan hutan lindung Sahendarumang.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Workshop membangun kesepahaman pengelolaan hutan lindung Sahendarumang. - Koordinasi dengan KPHL Wilayah III tentang rencana pelaksanaan pendataan hutan lindung Sahendarumang. - Koordinasi dengan KPHL Wilayah III tentang hasil pendataan hutan lindung Sahendarumang dan rencana pelaksanaan Diseminasi. - Diseminasi hasil pendataan hutan lindung Sahendarumang dan penataan wilayah 	

Komponen	Indikator	Capaian Indikator	Kendala/Hambatan
		administrasi kampung. - Unsur-unsur stakeholder yang hadir dalam rangkaian pertemuan adalah 9 SKPD, 5 kecamatan, 27 kampung, 4 NGO.	
	Setiap bulan dilakukan kunjungan ke SKPD mendiskusikan perkembangan program.	Kunjungan ke SKPD tidak dilakukan secara rutin.	
	Pemerintah kabupaten mengeluarkan 1 dokumen kebijakan tentang pembatasan perluasan lahan pertanian.	- Pemerintah Kabupaten mendeklarasikan Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai Kabupaten Organik. - Pemerintah Kabupaten mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengembangan Pertanian Organik di Kabupaten Kepulauan Sangihe.	

Komponen	Indikator	Capaian Indikator	Kendala/Hambatan
Keluaran 2 Demplot pengelolaan sumber daya alam.	Telah terbentuk 1 model percontohan pengelolaan sumber daya alam terpadu pada suatu lahan seluas 10 ha.	Belum ada model percontohan pengelolaan sumber daya alam terpadu dilahan seluas 10 ha.	
2.1 Pelatihan kelompok masyarakat dalam mengelola SDA	Pelatihan dilaksanakan bagi 3 kelompok masyarakat di 3 kampung diikuti oleh 60 orang.	Pelatihan pertanian teknik permakultur dilaksanakan di 4 kelompok di 4 kampung yaitu di kampung Malamenggu, Bukide, Pelelangeng, dan Kulut 1.	
2.2 Pembangunan demplot pengelolaan SDA	Dibangun 1 model percontohan pengelolaan SDA terpadu di 1 kampung dengan luas 10 ha.	Kebun percontohan pertanian teknik permakultur dibangun dibangun dilahan masyarakat di 4 kelompok yang total seluasnya sekitar 1 ha.	
	Terdapat 3 kelompok masyarakat membuat pengelolaan SDA.	4 kelompok di Kampung Malamenggu, Bukide, Pelelangeng, dan Kulur 1 sebanyak 72 orang mengikuti pelatihan dan mempraktekan kebun percontohan pertanian permakultur.	

B. Proses dan capaian kegiatan

Keluaran 1. Pemerintah dan masyarakat kampung merumuskan dan melaksanakan kesepakatan kampung dalam mengelola SDA didukung kebijakan pemerintah Kabupaten, dicapai dengan kegiatan sebagai berikut:

1.1 Surveyutupan hutan dalam kawasan hutan lindung Sahendarumang

Pelaksanaan

1. Pertemuan di tingkat kecamatan

Pertemuan di tingkat kecamatan dilaksanakan di Kecamatan Manganitu, Tamako, Tabukan Tengah, untuk membahas pelaksanaan pendataan hutan lindung Sahendarumang dan penataan wilayah administrasi kampung, yang dihadiri oleh 44 peserta 31 Laki-laki dan 13 Perempuan. Dari pertemuan ini diperoleh dukungan dari pemerintah kampung dan rencana kegiatan pengambilan data. Jadwal dan kehadiran pertemuan kecamatan adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal	Kecamatan	Kehadiran		
			L	P	Jumlah
1	28 Juni	Tamako dan Manganitu Selatan	14	8	22
2	2 Juli	Tabukan Tengah dan Tabukan Selatan	5	3	8
3	9 Juli	Manganitu	12	2	14
Jumlah			31	13	44

2. Sosialisasi di kampung

Sosialisasi dilaksanakan di 23 kampung dihadiri peserta sebanyak 376 orang. Sosialisasi bertujuan untuk menyampaikan informasi tentang rencana pendataan hutan lindung Sahendarumang sekaligus mensosialisasikan keberadaan hutan lindung Sahendrumang kepada masyarakat.

Daftar kehadiran perkecamatan:

No	Kecamatan	Jumlah Kampung	Kehadiran
1	Manganitu	8	171
2	Tabukan Tengah	6	85
3	Tabukan selatan	2	11
4	Manganitu Selatan	1	9
5	Tamako	6	100
	Jumlah	23	376

Daftar kehadiran peserta sosialisasi per kampung

No	Tanggal	Kecamatan/Kampung	Kehadiran	
		Manganitu		171
1		Lebo	0	
2	20 Juli	Belengan	14	
3	16 Juli	Barangakalang	14	
4	26 Juli	Sesiwung	15	
5	30 Agustus	Kauhis	30	
6	22 Agustus	Karatung I	25	
7	2 Agustus	Karatung II	16	
8	10 Agustus	Pinebentangang	12	
9	15 Agustus	Hiung	45	
10		Taloarane 1	0	

No	Tanggal	Kecamatan/Kampung	Kehadiran	
		Tabukan Tengah		85
11	12 Juli	Miulu	10	
12	26 Juli	Pelelangeng	26	
13	20 Juli	Bira	12	
14	23 Juli	Kulur I	24	
15		Kulur II		
16	16 Juli	Bowongkali	13	
		Tabukan selatan		11
17	31 Juli	Bukide		
18	28 Juli	Malamenggu	11	
		Manganitu Selatan		9
19	25 September	Pindang	9	
		Tamako		100
20	26 Juli	Lelipang	25	
21	16 Juli	Upel	11	
22	10 Juli	Binala	15	
23	28 Juli	Menggawa2	27	
24	14 September	Nagha1	22	
25		Nagha 2		
26		Dagho	0	
27		Pananaru	0	
Jumlah			376	376

3. Pendataan kawasan hutan lindung Sahendrumang dan wilayah administrasi kampung

Kegiatan pendataan kawasan hutan lindung Sahendarumang dilaksanakan tanggal 11 Juli – 26 September 2018. Jumlah peserta yang berpartisipasi dari lembaga pemerintah, NGO, pemerintah kampung, dan masyarakat sebanyak 158 orang. Dilaksanakan di 24 kampung, menggunakan aplikasi GeoODK Collage, Avenza, dan GPS.

Tabel pelaksanaan pendataan:

No	Kampung	Tanggal	Peserta					Jumlah
			Sampiri	KPHL	Dinas/ Badan	Kampung		
						L	P	
1	Karatung I	23 Agustus	1			10	2	13
2	Karatung II	3 Agustus	1	2		8	1	12
3	Kauhis	31 Agustus	1			3		4
4	Sesiwung	27 Juli	1			8		9
5	Lebo							0
6	Belengan	21 Juli	1	1		9		11
7	Barangkalang	17 Juli	1	2		9		12
8	Miulu	13 Juli	2	1		7		10
9	Pelelangeng	27 Juli	1			4		5
10	Bira	21 Juli	2			9	1	12
11	Kulur I		2			5		7
12	Kulur II	24 Juli	2			1		3
13	Bowongkali	17 Juli	1			5	2	8
14	Bukide	31 Juli	1	1		3		5
15	Malamenggu	28 Juli	1			7	4	12
16	Binala	11-12 Juli	1			5		6
17	Lelipang	27 Juli	1	2		3		6
18	Ulung Peliang	17 Juli	1	2		3		6
19	Menggawa 2	30 Juli	1	2		3		6
20	Dagho	21 Agustus	1			3		4
21	Pindang	26-Sep	1			14	6	21
22	Hiung							0
23	Taloarane 2	20 Agustus	1			2	1	4
24	Pinebentengan	11 Agustus	1	2		6		9
25	Nagha I		1			2		3
26	Nagha II	3 Agustus	2			2		4
27	Pananaru							0
	Jumlah		4	6	0	131	17	
			158					

Tabel peserta pendataan menurut lembaga:

LEMBAGA	PESERTA	
	L	P
KPHL	6	
Dinas/Badan OPD Sangihe	0	
Burung Indonesia	1	
Perkumpulan Sampiri	4	
Pemerintah & Masyarakat kampung	131	17
TOTAL	158	

4. Pengolahan data

- Data lapangan hasil survei menggunakan aplikasi GeoODK Collage, Avenza, dan GPS.
- Data lapangan diolah dengan menggunakan program ArcGIS dan QGIS.
- Sumber Peta adalah Peta RBI Bakosultanal 1991, Citra Landsat 2017, dan Citra Satelit SPOT 5.
- Sistem proyeksi: Datum WGS 1984, Sistem Koordinat UTM WGS 1984 Zona 51N, Proyeksi Transverse Merkator.
- Penentuan koordinat menggunakan Grid Geografi.

Hasil pengolahan data sebagai berikut:

a. Kecamatan – Kampung – Luas Kawasan

Kecamatan (yang masuk dalam kawasan HL)	5
Kampung (yang masuk dalam kawasan HL)	22
Luas Kawasan Hutan Lindung Sahendarumang II	3,487.820 Ha
Luas Kawasan Hutan Primer	1,820.559 Ha

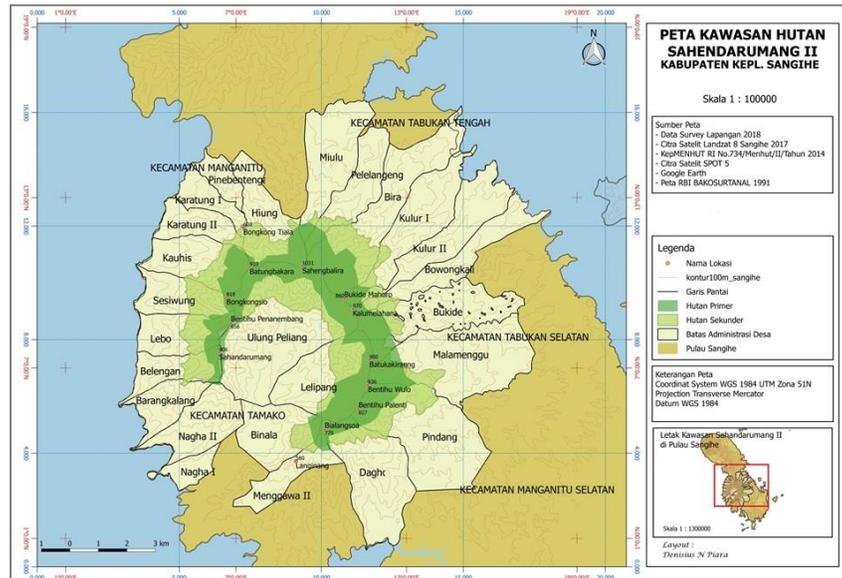
b. Luas Hutan per Kecamatan

No. Urut	Kecamatan	Luas Hutan Lindung	Luas Hutan primer
1	Manganitu	913.820	366.370
2	Tabukan Tengah	673.364	341.770
3	Tabukan selatan	354.746	262.010
4	Tamako	1,229.600	704.622
5	Manganitu Selatan	316.290	145.787
	JUMLAH (LUAS)	3,487.820	1,820.559

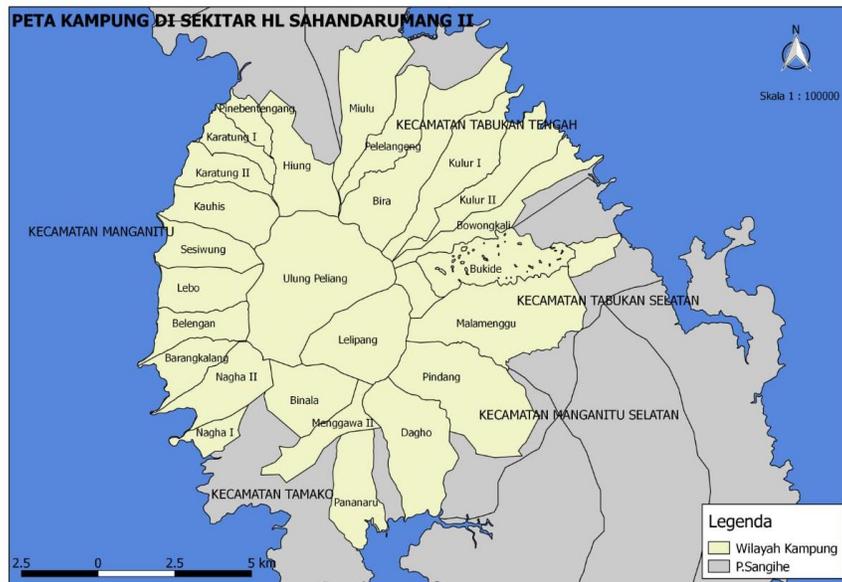
c. Luas Hutan per Kampung

No. Urut	Kampung	Luas Wilayah Administrasi (ha)	Luas Kawasan Lindung (ha)	Luas Hutan primer (ha)
1	Taloarane 1	Belum diketahui.	0	0
2	Hiung	Belum diketahui.	238.408	101.142
3	Pinebentengang	170,090	0	0
4	Karatung I	209.528	9.196	0
5	Karatung II	304.869	19.957	0.642
6	Kauhis	512.513	207.855	119.817
7	Sesiwung	387.026	150.405	16.413
8	Lebo	412.445	167.710	77.229
9	Belengan	330.124	116.739	50.316
10	Barangkalang	312.952	3.550	0.811
11	Miulu	638.750	34.708	27.454
12	Pelelangeng	449.000	70.297	33.341
13	Bira	976.801	420.136	232.064
14	Kulur I	658.973	81.792	35.872
15	Kulur II	593.794	24.713	1.683
16	Bowongkali	500.683	41.718	11.356
17	Bukide	777.420	189.040	139.256
18	Malamenggu	1,109.000	165.706	122.754
19	Binala	524.420	82.637	29.83
20	Lelipang	732.300	401.917	242.175
21	Ulung Peliang	1,495.970	594.302	348.491
22	Menggawa 2	331.520	46.362	42.724
23	Dagho	824.190	104.382	39.732
24	Nagha I	163.150	0	0
25	Nagha II	481,700	0	1.67
26	Pananaru	481.900	0	0
27	Pindang	1,062.789	316.290	145.787
			3,487.820	1,820.56

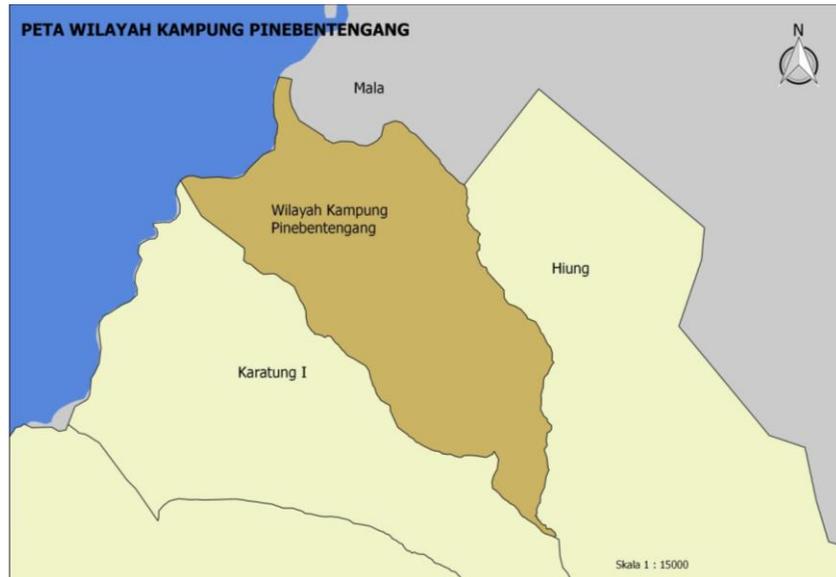
d. Peta wilayah kampung, tutupan hutan lindung dan hutan primer



e. Peta Wilayah Kampung



e.1 Peta Wilayah Kampung Pinebentengang



e.2 Peta Wilayah Kampung Karatung I



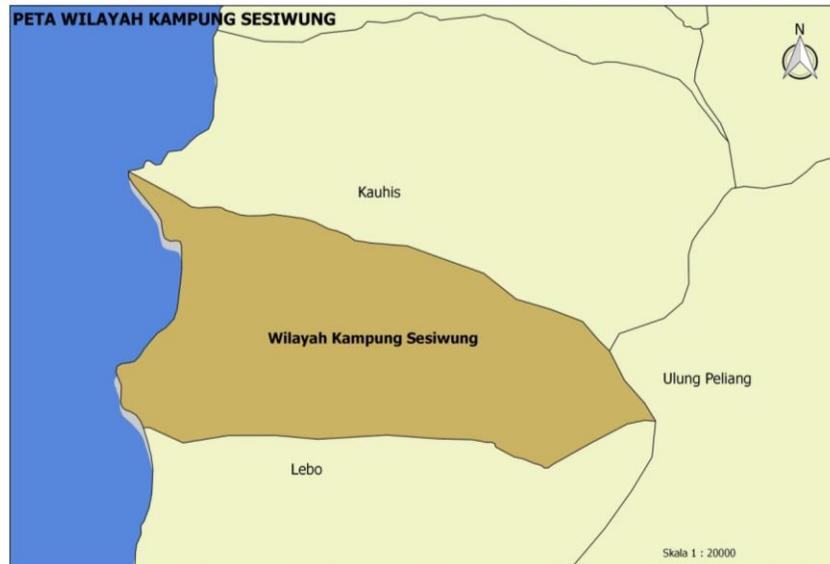
e.3 Peta Wilayah Kampung Karatung II



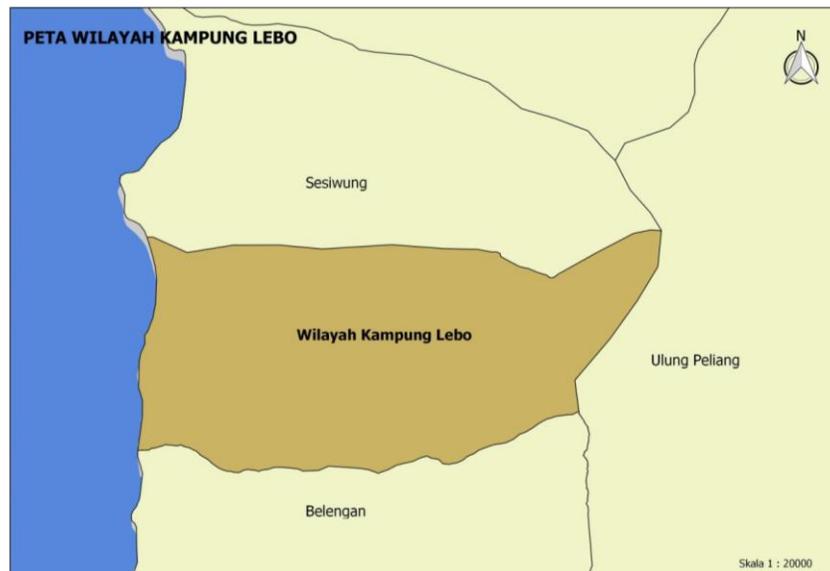
e.4 Peta Wilayah Kampung Kauhis



e.5 Peta Wilayah Kampung Sesiwung



e.6 Peta Wilayah Kampung Lebo



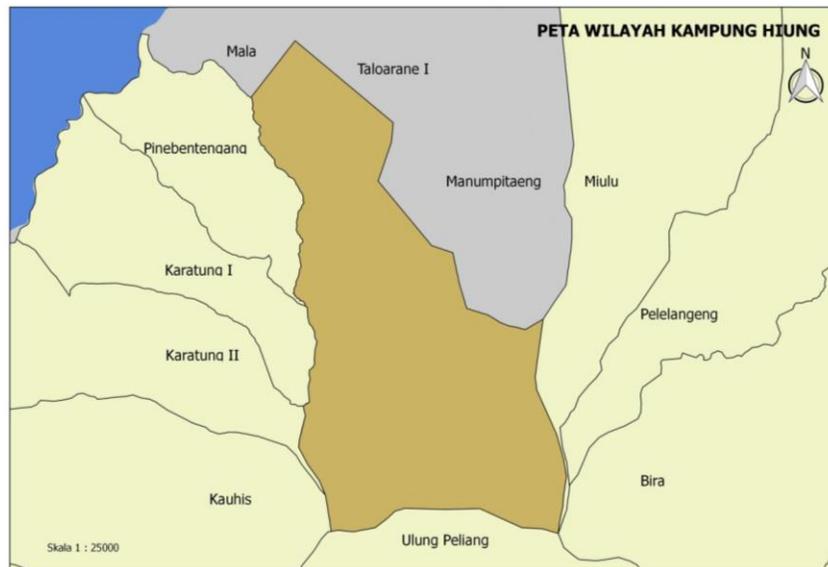
e.7 Peta Wilayah Kampung Belengan



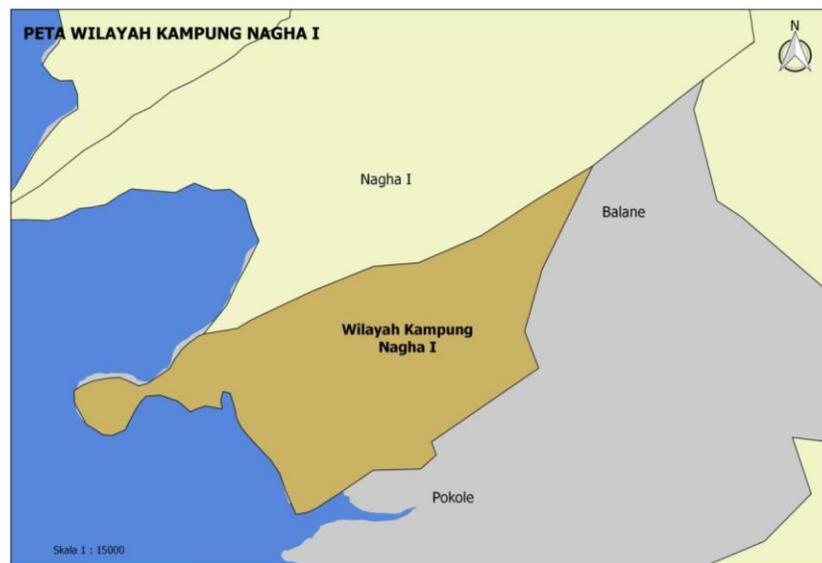
e.8 Peta Wilayah Kampung Barangkalang



e.9 Sketsa Wilayah Kampung Hiung



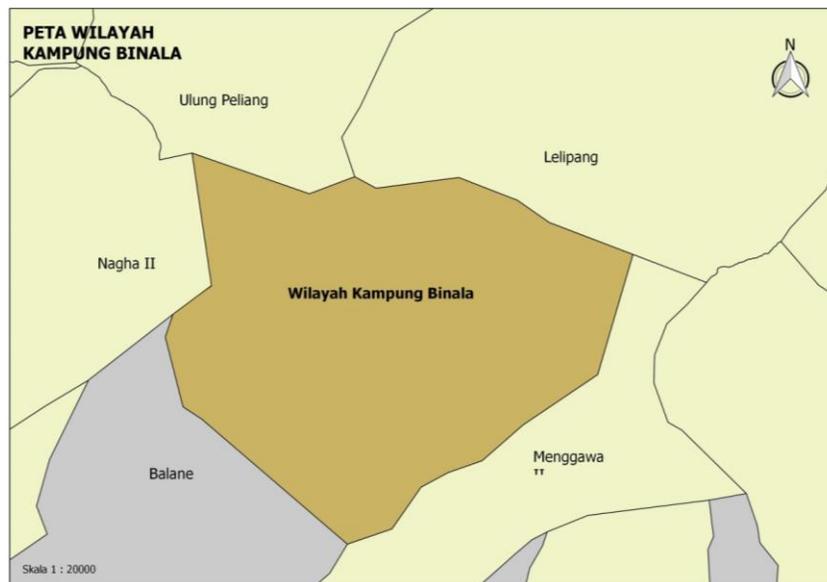
e.10 Peta Wilayah Kampung Nagha I



e.11 Peta Wilayah Kampung Nagha II



e.12 Peta Wilayah Kampung Binala



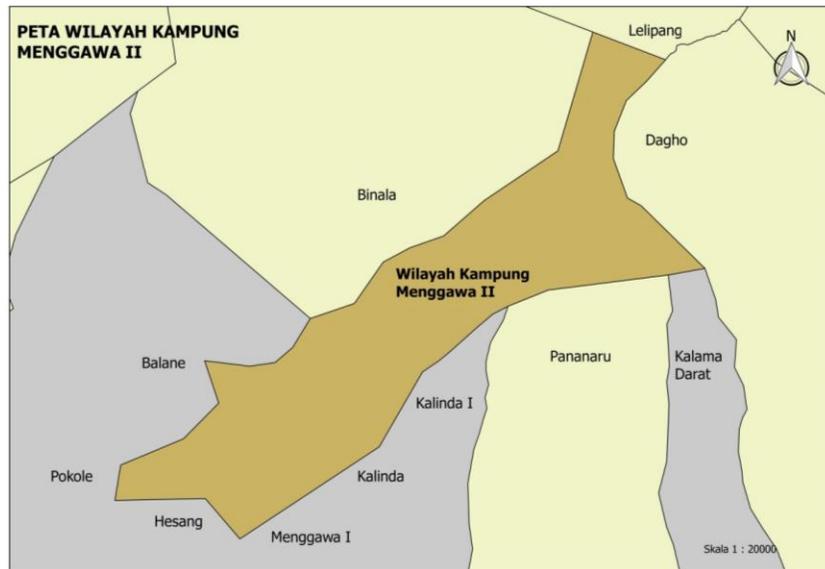
e.13 Peta Wilayah Kampung Lelipang



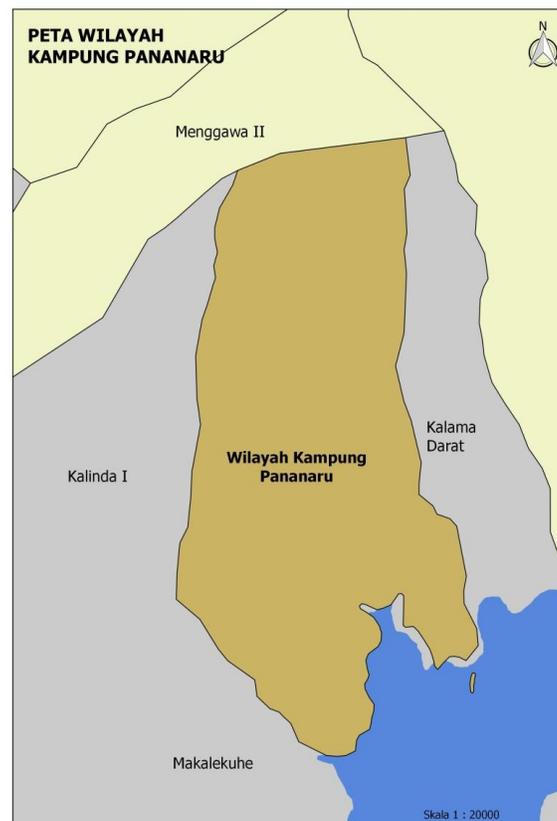
e.14 Peta Wilayah Kampung Ulung Peliang



e.15 Peta Wilayah Kampung Menggawa II



e.16 Peta Wilayah Kampung Pananaru



e.17 Peta Wilayah Kampung Dagho



e.18 Peta Wilayah Kampung Pindang



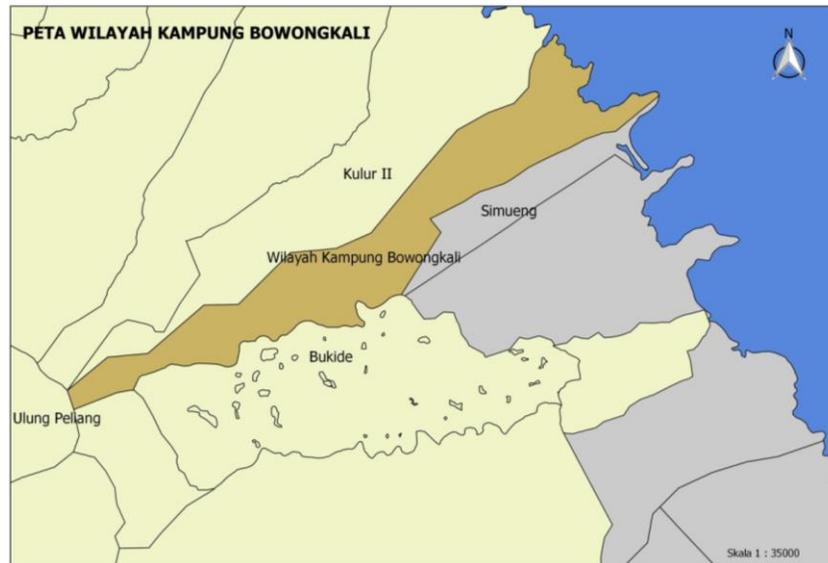
e.19 Peta Wilayah Kampung Malamenggu



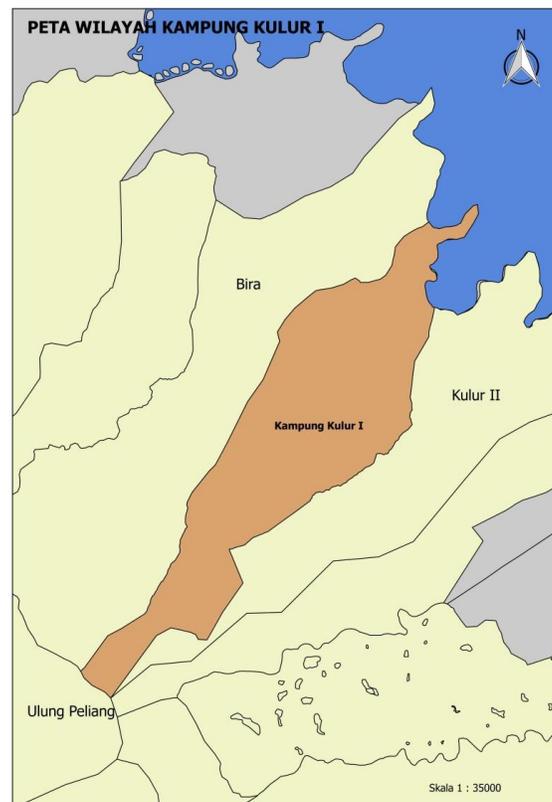
e.20 Peta Wilayah Kampung Bukide



e.21 Peta Wilayah Kampung Bowongkali



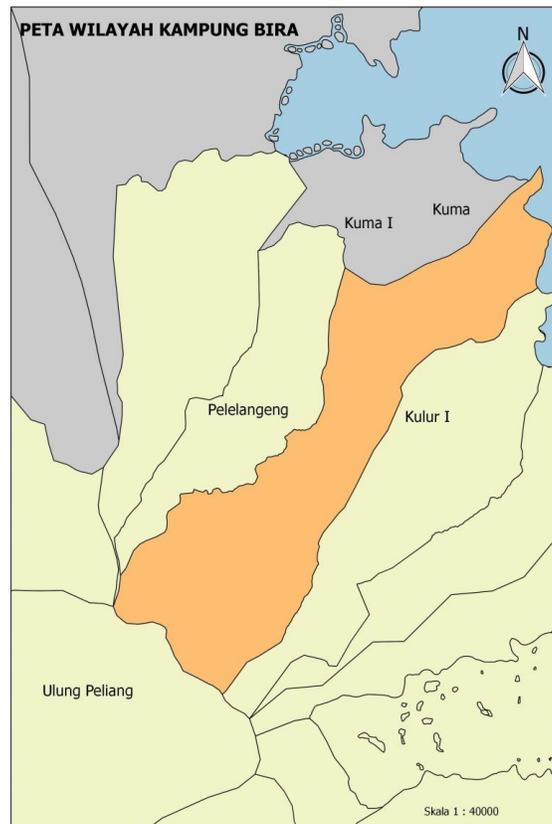
e.22 Peta Wilayah Kampung Kulur I



e.23 Peta Wilayah Kampung Kulur II



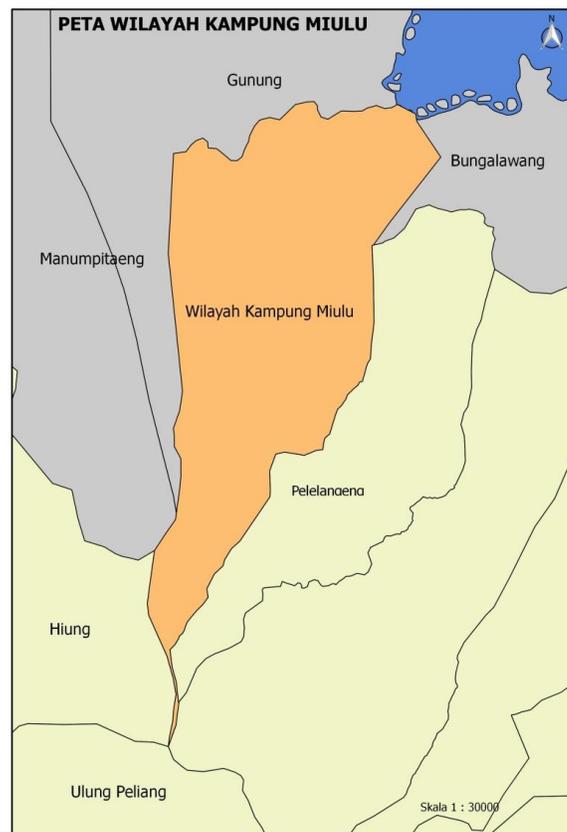
e.24 Peta Wilayah Kampung Bira



e.25 Peta Wilayah Kampung Pelelangeng



e.26 Peta Wilayah Kampung Miulu



Capaian Hasil

- Dukungan pemerintah kampung dan masyarakat dalam kegiatan pendataan hutan lindung Sahendarumang dan penataan wilayah administrasi kampung.
- Hasil pendataan hutan lindung Sahendarumang dan penataan wilayah administrasi kampung di 26 kampung.
- Peta partisipatif kawasan hutan lindung Sahendarumang berbasis kampung.

Hambatan

1.2 Diskusi kampung untuk implementasi pengelolaan SDA

Pelaksanaan

1. Musyawarah Kampung Malamenggu

Kegiatan musyawarah kampung ini dilaksanakan bersamaan dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kampung Malamenggu pada tanggal 22 September 2017, bertempat di kantor kampung. Musyawarah dihadiri oleh 28 orang peserta, terdiri dari 18 Laki-laki dan 10 Perempuan.

Musyawarah dibuka oleh Pejabat Kapitalaung bapak S. Pontoh dan doa oleh Ketua MTK bapak U. P. Rokoh.

Pada tahapan musyawarah kampung, proses yang dilakukan adalah mendengarkan usulan gagasan dari setiap lindongan (dusun). Gagasan-gagasan dari dusun selanjutnya didiskusikan/dimusyawarahkan untuk pengambilan keputusan.

Dari proses diskusi yang berlangsung dalam musyawarah, hanya ada satu usulan lindongan yang bersesuaian atau yang mendukung pelestarian kawasan hutan yaitu mata air yang digunakan masyarakat harus direhabilitasi. Usulan ini disampaikan oleh bapak Stipen Meherung. Namun usulan tersebut belum masuk dalam rencana pembangunan kampung Malamenggu.

Sampai dengan musyawarah berakhir, tidak ada usulan kegiatan kampung yang relevan dengan pengelolaan sumber daya alam khususnya perlindungan kawasan hutan lindung Sahendarumang:

Bidang	Program/Kegiatan
Bidang I. Pemerintahan	Tidak ada
Bidang II. Pembangunan	Tidak ada
Bidang III. Pembinaan Kemasyarakatan	Tidak ada
Bidang IV. Pemberdayaan Masyarakat	Tidak ada

2. Musyawarah Kampung Bukide

Musyawarah rencana pembangunan Kampung Bukide dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 2017, bertempat di balai pertemuan umum Kampung Bukide. Hadir dalam musyawarah tersebut sebanyak 38 orang, terdiri dari 25 Laki-laki dan 13 Perempuan. Musyawarah dibuka oleh sekretaris kampung bapak Rindu H. Lanongbuka dan arahan disampaikan oleh pejabat Kepala Kampung bapak A. Makawoel.

Selain masukan yang diterima dari dusun, masukan/usulan kegiatan yang berkembang dalam musyawarah kampung, antara lain pelestarian dan pemantauan kawasan lindung, reboisasi lahan kritis, pengembangan tanaman sagu dan budidaya tanaman rotan. Kegiatan tersebut bisa menjaga keseimbangan iklim, menjaga daerah resapan air, menyediakan bahan makanan, dan menyediakan stok rotan di alam sebagai bahan baku produk kerajinan lokal Kampung Bukide, yang diusulkan oleh bapak Rindu Hibur Lanongbuka.

Dibawah ini adalah hasil kesepakatan musyawarah rencana pembangunan Kampung Bukide tahun 2018, yang relevan dengan pengelolaan sumber daya alam khususnya perlindungan kawasan hutan lindung Sahendarumang:

Bidang	Program/Kegiatan
Bidang I. Pemerintahan	Tidak ada
Bidang II. Pembangunan	Tidak ada
Bidang III. Pembinaan	Tidak ada

Kemasyarakatan	
Bidang IV. Pemberdayaan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Budidaya ikan air tawar 2. Pengadaan bibit ayam dan itik/peternakan 3. Penyuluhan pengembangan pertanian 4. Pelestarian dan pemantauan kawasan lindung 5. Pelatihan teknologi pertanian 6. Reboisasi lahan kritis 7. Pengembangan tanaman sagu 8. Budidaya tanaman rotan

3. Musyawarah Kampung Pelelangeng

Musyawarah Kampung Pelelangeng dilaksanakan dalam 2 bentuk pertemuan, yaitu pertemuan di lindungan/dusun dan pertemuan kampung.

1) Pertemuan penggalan gagasan di lindungan I

Pertemuan dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2017 di kantor Kampung Pelelangeng. Pertemuan dihadiri oleh 18 warga lindungan I yaitu 9 Laki-laki dan 9 Perempuan. Pertemuan dipimpin oleh Daniel Dainga sebagai kepala urusan pembangunan. Diawal pertemuan Perkumpulan Sampiri menjelaskan maksud dilaksanakannya pertemuan yaitu untuk mengidentifikasi kegiatan-kegiatan apa yang bisa dilakukan untuk mendukung pelestarian hutan lindung Sahendarumang.

Melalui diskusi beberapa peserta menyampaikan masukan/usulan, sebagai berikut:

1. Bapak Daniel Dainga: penanaman pohon di daerah rawan longsor dan Penanaman pohon di kawasan hutan lindung Sahendarumang.
2. Ibu Johima Dainga: pengadaan bibit babi, bibit ikan nila, pembuatan kelompok budidaya, dan penyuluhan budidaya.
3. Ibu Yulwati Kakampu: pelatihan pemanfaatan sampah menjadi pupuk organik.
4. Ibu Maria Duran: gerakan tanam halaman rumah (gentaharum)

Setelah melewati proses diskusi, maka usulan-usulan/ide-ide yang dibawa ke pertemuan kampung adalah:

1. Penanaman pohon di daerah rawan longsor.
2. Penanaman pohon di kawasan hutan lindung Sahendarumang.
3. Pelatihan pemanfaatan sampah menjadi pupuk organik.
4. Pengadaan bibit babi, dan bibit ikan nila.
5. Pembuatan kelompok budidaya.
6. Penyuluhan budidaya.
7. Gerakan tanam halaman rumah (Gentaharum).

2) Penggalan Gagasan di lindungan II

Penggalan gagasan di lindungan II dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2017 bertempat di rumah N. Adameng. Pertemuan dihadiri oleh 20 orang terdiri dari 17 laki-laki dan 3 perempuan, dipimpin oleh bapak N. Adameng sebagai Kepala Lindungan II Kampung Pelelangen.

Sama halnya pada pertemuan di lindungan I, diawal pertemuan perkumpulan Sampiri menjelaskan maksud dan tujuan pertemuan, agar peserta yang hadir dapat memahami maksud pelaksanaan kegiatan ini.

Dalam pertemuan diperoleh masukan usulan kegiatan, yaitu antara lain:

1. Bapak Alex Abram: perlindungan mata air.
2. Bapak Josef: Pembuatan bak sampah keluarga, dan pelatihan pemanfaatan sampah menjadi pupuk organik.
3. Bapak Sebedeus Abram: pengadaan bibit ikan nila, dan bibit babi.
4. Ibu M. Masoa: pembentukan kelompok budidaya dan penyuluhan budidaya.
5. Bapak Kores Kundimang: pengadaan jamban keluarga.
6. Ibu Ajibna Wangka: gerakan tanam halaman rumah (gentaharum).

3) Musyawarah kampung untuk implementasi pengelolaan sumber daya alam di Kampung Pelelangeng

Dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2017 bertempat di Kantor Kampung Pelelangen dihadiri oleh 33 orang terdiri dari 21 laki-laki dan 12

perempuan. Pertemuan dipimpin oleh pejabat Kapitalaung Bapak S. Kundimang.

Dalam pembukaan diskusi selaku pejabat kapitalaung dan pemerintah kampung bapak S. Kundimang menyampaikan apresiasinya atas kehadiran perangkat pemerintah kampung, tokoh masyarakat dan masyarakat kampung Pelelangeng. Pejabat kapitalaung menyampaikan terima kasih atas proses fasilitasi yang dilakukan oleh Perkumpulan Sampiri di Kampung Pelelangeng. Kesempatan berikutnya pejabat Kapitalaung memberikan waktu kepada Perkumpulan Sampiri. Deni N. Piara Mengingatkan semua peserta tentang adanya Peraturan Kampung tentang Tata Kelola Ruang Kampung yang bisa diintegrasikan kedalam RPJM dan RKP Kampung tahun 2018.

Dalam proses mengintegrasikan kesepakatan-kesepakatan yang tertuang dalam Tata Kelola Ruang Kampung peserta diajak mengingat kembali usulan-usulan yang masuk dalam RPJM Kampung tahun 2017 yang belum terealisasi.

Setelah dilakukan evaluasi terhadap usulan yang belum terealisasi, maka di tahun 2018 kegiatan yang relevan dengan pelestarian kawasan hutan lindung Sahendarumang dan pengelolaan sumber daya alam kampung adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan BUMDES
2. Budidaya ternak dan ikan air tawar
3. Penanaman 200 pohon di sekitar mata air
4. Penanaman pohon di daerah rawan longsor
5. Penanaman pohon di kawasan hutan lindung Sahendarumang
6. Sosialisasi tentang kawasan hutan lindung Sahendarumang
7. Gerakan tanam halaman rumah oleh kelompok PKK
8. Pelatihan pemanfaatan sampah menjadi pupuk organik

Capaian Hasil

- Terlaksana 2 kali pertemuan di dusun.
- Terlaksana 3 kali pertemuan di kampung
- Teridentifikasi kegiatan-kegiatan pengelolaan lingkungan yang akan

dimusyawarahkan di tingkat kampung.

Hambatan

Proses musyawarah kampung mengikuti mekanisme pembahasan dan penggalian gagasan dalam perencanaan pembangunan kampung, sehingga proyek tidak bisa melakukan inovasi proses fasilitasi.

1.3 Pengkajian kampung secara partisipatif

Pelaksanaan

Pengkajian partisipatif di kampung Kulur 1

a. Pengkajian di Lindongan/dusun I

Dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 2017, bertempat di rumah Bapak T. Simon dihadiri oleh 13 warga yaitu 10 Laki-laki dan 3 Perempuan.

Diawal pertemuan, Perkumpulan Sampiri menjelaskan maksud dan tujuan pelaksanaan pengkajian kampung, serta mensosialisasikan program pelestarian hutan lindung Sahendarumang kepada masyarakat di lindongan I, agar masyarakat mengetahui dan mendukung program dan berpartisipasi dalam kegiatan pelestarian, serta terdorong untuk memasukan kegiatan pelestarian hutan lindung Sahendarumang ke dalam rencana pembangunan kampung.

Dalam proses penggalian gagasan, beberapa usulan yang disampaikan warga, yaitu:

1. Bapak Huliselan: pemetaan batas wilayah kampung.
2. Bapak Kaemung: Penanaman pohon di daerah mata air, dan bantuan kepada kelompok tani.

b. Pengkajian di lindongan/dusun II

Penggalian gagasan di lindongan II dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2017 bertempat di Kantor Kampung Kulur 1, dihadiri oleh 13 Warga, 2 Laki-laki dan 11 Perempuan.

Usulan gagasan penggalian gagasan, adapun ide-ide atau usulan-usulan dari masyarakat lindongan II sebagai berikut :

1. Bapak Manuel Pelo: Pelestarian hutan lindung Sahendarumang,

Penanaman seribu pohon di kawasan hutan lindung Sahendarumang, pemetaan batas kampung, Pelestarian terumbu karang.

2. Ibu L. Amal: Pengadaan mesin pembuatan pupuk organik dan pelatihan pembuatan pupuk organik
3. Ibu R, Marthin: Pengadaan bibit babi, ayam, kambing, Pengadaaan bibit cengkeh dan pala

Ide dan usulan kegiatan selanjutnya didiskusikan dan menyepakati usulan yang akan dibawa ke pertemuan tingkat kampung yaitu sebagai berikut :

1. Pelestarian hutan lindung Sahendarumang
2. Penanaman seribu pohon di kawasan hutan lindung Sahendarumang
3. Pemetaan batas kampung
4. Pelestarian terumbu karang
4. Pengadaan mesin pembuatan pupuk organik
5. pelatihan pembuatan pupuk organik
6. Pengadaan bibit babi
7. Pengadaan bibit ayam
8. Pengadaan bibit kambing
9. Pengadaaan bibit cengkeh dan bibit pala

c. Pengkajian di lindongan/dusun III

Penggalian gagasan di lindongan III dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober 2017, bertempat di rumah Ibu Y. Lukas. Pertemuan dihadiri oleh 21 Warga , 7 Laki-laki dan 14 Perempuan.

Ide-ide atau usulan-usulan dari masyarakat lindongan III sebagai berikut:

1. Bapak Marthin Pelo: Pembentukan kelompok tani, Pengadaan pupuk ponska, pupuk organik, mesin pengolahan pupuk organik dan pelatihan pembuatan pupuk organik.
2. Bapak Alfret Alemos: pelestarian mata air dan pembebasan lahan mata air.
3. Bapak Ismael Lukas: pengadaan bibit ayam.
4. Ibu Kartini Makanaung: Pembuatan tempat pengolahan sagu.

Ide kegiatan yang akan usulkan ke pertemuan kampung yaitu sebagai berikut :

1. Pembentukan kelompok tani
2. Pengadaan pupuk ponska
3. Pengadaan pupuk organik
4. pengadaan mesin pengolahan pupuk organik
5. Pelatihan pembuatan pupuk organik
6. Pelestarian mata air
7. Pembebasan lahan mata air
8. Pengadaan bibit ayam
9. Pembuatan tempat pengolahan sagu

d. Pengkajian di lindongan/dusun IV

Pengkajian gagasan lindongan IV dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2017, di rumah Ibu W. Masoa. Pertemuan dihadiri oleh 14 warga, 7 laki-laki dan 7 Perempuan.

Ide usulan kegiatan dari masyarakat lindongan IV sebagai berikut :

1. Bapak Mandahari: pelestarian hutan lindung Sahendarumang karena hutan lindung merupakan daerah resapan air.
2. Ibu A. Tinggahari: pengadaan pupuk organik, pelatihan pembuatan pupuk organik dan pengadaan bibit cabe, tomat, dan kacang panjang.
3. Ibu W. Masoa: pengadaan tempat pengolahan sagu dan mesin pengolahan sagu.
4. Bapak Markus Lahama: penetapan dan pemetaan batas kampung.

Usulan kegiatan yang akan dibawa ke pertemuan kampung yaitu sebagai berikut:

1. Pelestarian hutan lindung Sahendarumang
2. Pengadaan pupuk organik
3. Pelatihan pembuatan pupuk organik

4. Pengadaan bibit rica, tomat, kacang panjang dan pare-pare
5. Pengadaan tempat pengolahan sagu
6. Pengadaan mesin pengolahan sagu
7. Penetapan dan pemetaan batas kampung

e. Musyawarah kampung

Musyawarah kampung dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2017 bertempat di Kantor Kampung Kulur I, dihadiri oleh 37 warga, 21 Laki-laki dan 16 Perempuan. Musyawarah dipandu oleh ibu Yul Sasihang bertindak sebagai pengarah acara. Musyawarah dibuka oleh Pejabat Kapitalaung Ibu A. Marthin, Sedangkan diskusi di pimpin oleh Ketua MTK bapak O. A. Masoara.

Proses musyawarah sebagai berikut:

1. Pembacaan gagasan usulan kegiatan dari tiap lindongan yang disampaikan oleh kepala lindongan masing-masing;
2. Diskusi hasil musyawarah memberikan kesempatan untuk menyampaikan masukan dari gagasan menurut bidang- bidangnya, adapun masukan-masukan sebagai berikut :

Bidang I. Pemerintahan

1. Penetapan batas wilayah

Bidang II. Pembangunan

1. Pembangunan tempat pengolahan sagu
2. Pelestarian mata air
3. Pengadaan mesin pengolahan sagu

Bidang III. Pembinaan Masyarakat

Tidak ada.

Bidang IV. Pemberdayaan Masyarakat

1. Penanaman di kawasan mata air
2. Pelestarian hutan lindung Sahendarumang

<ol style="list-style-type: none"> 3. Pelatihan pembuatan pupuk organik 4. Pengadaan bibit babi, ayam dan kambing 5. Pengadaan bibit pala dan cengkeh 6. Pelestarian terumbu karang 7. Pembentukan kelompok tani
Capaian Hasil <ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya musyawarah penggalan gagasan di dusun - Terlaksananya musyawarah perencanaan ditingkat kampung - Adanya aspirasi usulan kegiatan dari tingkat dusun - Kegiatan pelestarian sumber daya alam dan hutan lindung Sahendrumang masuk dalam prioritas kegiatan.
Hambatan

1.4 Perumusan Kesepakatan Kampung

Pelaksanaan Tidak terlaksana
Capaian Hasil
Hambatan <ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah kampung tidak siap melaksanakan musyawarah kampung membangun kesepakatan. - Ketidaksiapan pemerinta kampung disebabkan karena dinamika politik di kampung.

1.5 Pelatihan dan pendampingan kelompok pengelola ruang kampung

Pelaksanaan <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan dan pendampingan kelompok Tasumaro Kampung Bukide Pelatihan kelompok pengelola ruang kampung Bukide dilaksanakan pada tanggal 23-24 Oktober 2017 di Balai Pertemuan Umum Kampung Bukide. Peserta yang hadir berjumlah 13 orang, terdiri dari 13 Laki-laki dan 0 Perempuan. Agenda pelatihan tanggal 23 Oktober 2017 adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian materi tentang Perencanaan Pembangunan Desa.
--

2. Penyampaian materi tentang Tata Kelola Ruang Kampung oleh Perkumpulan Sampiri.
3. Penyusunan Anggaran Dasar Kelompok Tasumaro oleh Perkumpulan Sampiri.

Proses pelatihan hari pertama sebagai berikut:

- Salam pembuka dan doa disampaikan oleh Sem H. Tamasegho
- Penjelasan maksud workshop oleh Perkumpulan Sampiri yang diwakili oleh Roland Tampilang.
- Arahan dan pembukaan oleh Pejabat Kapitalaung, Bapak A. Makawoel
- Penyampaian materi 1, Perencanaan Pembangunan Desa oleh Perkumpulan Sampiri
- Penyampaian materi 2, Tata Kelola Ruang Kampung oleh Perkumpulan Sampiri
- Penyusunan Anggaran Dasar Kelompok Tasumaro difasilitasi oleh Perkumpulan Sampiri.

Hasil pelatihan hari pertama:

1. Setelah menerima materi, penjelasan dan diskusi pada hari pertama, peserta pelatihan mengetahui proses perencanaan kampung dan bagaimana kelompok dapat berpartisipasi dalam menyampaikan ide gagasan kegiatan kedalam rencana pembangunan kampung.
2. Pengurus dan anggota kelompok mengetahui dan memahami isi dari peraturan kampung tentang tata kelola ruang kampung, yang akan menjadi tugas pendampingan mereka.
3. Adanya rumusan sederhana tentang dasar dan landasan pembentukan kelompok Tasumaro, yaitu sebagai berikut:
 - Nama Kelompok: Tasumaro
 - Artinya : Tidak berkekurangan, tidak akan habis, selalu menghasilkan.
 - Tanggal berdiri : 23 Desember 2016
 - Kedudukan : Kampung Bukide
 - Asas : Pancasila dan UUD 1945

- Tujuan : Mewujudkan kesejahteraan masyarakat
- Fungsi dan Visi :
 - Membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan kampung
 - Membantu meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat
 - Menjadi wadah untuk menampung aspirasi masyarakat
- Misi :
 - Mengarahkan pembangunan masyarakat yang selaras dengan pembangunan kampung
 - Melestarikan hutan dan sumber mata air
 - Memperkenalkan dan mengembangkan pertanian ramah lingkungan
 - Meningkatkan kapasitas kelompok

Pelatihan dilanjutkan di hari kedua tanggal 24 Oktober 2017, agenda kegiatan sebagai berikut:

1. Penyegaran kembali hasil pelatihan hari pertama
2. Penyusunan program kerja kelompok Tasumaro

Proses pelatihan hari kedua sebagai berikut:

- Pelatihan diawali dengan pengantar oleh ketua kelompok Tasumaro, Sem H. Tamasegho
- Diskusi dan review hasil pelatihan hari pertama oleh Perkumpulan Sampiri
- Fasilitasi penyusunan Program Kerja Kelompok Tasumaro.

Hasil pelatihan hari kedua:

1. Peserta pelatihan masih mengingat hasil pelatihan hari pertama.
2. Proses fasilitasi dan diskusi menghasilkan rumusan program kegiatan Kelompok Tasumaro sebagai berikut :

NO	Program dan kegiatan	Indikator	Sumber dana
1	Pelatihan pembuatan pupuk organik hayati	Kelompok Tasumaro memiliki ketarampilan pembuatan POH	Pihak ketiga
2	Pengadaan mesin produksi pupuk organik hayati	1 unit mesin POH milik kelompok Tasumaro	APBK
3	Pelatihan pembuatan pupuk kompos cair	a. Kelompok tasumaro memiliki keterampilan pembuatan pupuk kompos cair	Pihak ketiga
		b. Masyarakat memiliki keterampilan pembuatan pupuk kompos cair	APBK
4	Pengadaan sarana pembuatan pupuk kompos cair	15 unit sarana pembuatan pupuk kompos cair	APBK
5	Pembangunan perpustakaan tani	a. Terbangun perpustakaan tani	APBK
		b. Adanya buku - buku pertanian	APBK
		c. Terlaksana pelatihan pengelolaan perpustakaan tani	APBK
		d. Pengadaan gambar - gambar pertanian	APBK
		e. Hari membaca	APBK
6	Sosialisasi kepada masyarakat tentang pengelolaan lahan pertanian yang sehat, ramah, ekonomis dan ramah lingkungan	75% masyarakat mengikuti sosialisasi, dan memahami cara pengolahan lahan pertanian yang sehat, ekonomis dan ramah lingkungan.	APBK
7	Rembuk tani	Rembuk tani dillaksanakan 4	APBK

			kali dalam setahun.	
8	Pelatihan sistem pertanian permakulture	20 orang ikut pelatihan permakulture		Pihak ketiga
9	Penanaman pohon pelindung disekitar mata air	100 pohon ditanam disekitar mata air		APBK
10	Pembuatan tanda batas kawasan hutan Sahendarumang	Masyarakat menanam bambu sebagai batas kawasan hutan Sahendarumang		APBK
11	Pengembangan kapasitas pengurus kelompok Tasumaro	Adanya kunjungan belajar kelompok Tasumaro		APBK
12	Pembuatan pestisida organik	Kelompok tasumaro memiliki keterampilan pembuatan pestisida organik		Pihak ketiga
13	Pembuatan kebun percontohan teknik permakultur	Pembuatan lahan percontohan atau penanaman 300 pohon cabe dan caesin di polibag		Pihak ketiga
<p>Capaian Hasil</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya pelatihan bagi kelompok Tasumaro - Dapat ditetapkan nama, tujuan, visi dan misi kelompok Tasumaro - Dapat dibahas program kegiatan kelompok Tasumaro 				
<p>Hambatan</p>				

1.6 Serial pertemuan dan diskusi para pihak di tingkat kabupaten

Pelaksanaan

Pertemuan di tingkat kecamatan dan kabupaten

1. Workshop membangun kesepakatan pengelolaan sumber daya alam di Kecamatan Tabukan Selatan

Kecamatan Tabukan Selatan memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Dengan kekakayaan alam yang dimiliki ini, memungkinkan masyarakat bekerja, mengolah, menghasilkan dan mengambil kekayaan alam ini untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Disadari bahwa pemanfaatan dan pengambilan sumber daya alam dewasa ini sudah sangat besar dan cepat. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan jumlah penduduk lokal, permintaan pasar lokal, pasar kabupaten, bahkan sampai pasar luar negeri. Harga-harga menggiurkan untuk jenis-jenis tertentu, menyebabkan meningkatnya upaya untuk mengeksploitasi kekayaan sumber daya alam. Tidak jarang terjadi, pengambilan SDA yang dilakukan oleh masyarakat, kurang memperhatikan kelestarian dan kesinambungan manfaatnya. Hal ini sangat berpotensi bahwa sewaktu-waktu kekayaan yang melimpah disekitar kita menjadi tinggal kenangan dan cerita.

Untuk membatasi laju penurunan kualitas lingkungan yang berdampak pada menurunnya ketersediaan SDA di sekitar kita, Perkumpulan Sampiri bekerja sama dengan Burung Indonesia, Perkumpulan Yapeka, dan CEPF, serta dukungan dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, membuat pendekatan pengelolaan SDA melalui pembentukan Tata Kelola Ruang Kampung (TKRK) dan Kawasan Konservasi Pesisir (KKP). Kegiatan-kegiatan ini dilaksanakan di Kampung Malamenggu, Bukide dan Batuwingkung. Melalui pendekatan ini, pemerintah kampung dan masyarakat memiliki ruang untuk mengelola SDA kampung secara swadaya dan mandiri. Inisiatif pendekatan yang sudah dilakukan di 3 kampung ini, hendak direplikasi atau dicontohkan kepada kampung-kampung lain di wilayah kecamatan Tabukan Selatan. Dengan tujuan agar ketika ada kebijakan-kebijakan yang bersesuaian dengan model pendekatan yang bersentuhan dengan aktifitas di wilayah administratif dan wilayah kelola kampung yang dilakukan oleh masyarakat kampung tetangga, dapat diterima, dihormati dan

dihargai. Gesekan-gesekan sosial antar masyarakat dalam penerapan pendekatan TKRK dan KKP pasti ada dan tidak bisa dihindari. Sebagai upaya untuk meminimalkan gesekan sosial antar masyarakat, maka perlu dibangun kesepakatan bersama antar kampung. Sehingga antar masyarakat kampung tidak ada ketidaktahuan terhadap suatu kebijakan yang berlaku di kampung tetangga. Dan lebih luas lagi, akan terbangun kesadaran bersama dalam menjaga dan melindungi sumber daya alam sebagai kekayaan bersama.

“Workshop Membangun Kesepakatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Kecamatan Tabukan Selatan” bertujuan membangun kesadaran dan inisiatif aksi dalam melestarikan sumber daya alam di Kecamatan Tabukan Selatan yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah kampung secara aktif, kreatif dan mandiri, demi menjamin kelangsung fungsi dan daya dukung sumber daya alam bagi kehidupan masyarakat.

Workshop dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 di Balai Pertemuan Umum Kecamatan Tabukan Selatan, yang diikuti 29 orang peserta terdiri dari Laki-laki = 20 orang, dan Perempuan = 9 orang, dari unsur Kapitaung (kepala kampung), sekretaris kampung, pengurus Majelis Tua-tua Kampung, Pengurus kelompok Tasumaro, Pengurus Kelompok Cinta Laut, Pegawai Kantor Kecamatan, Penyuluh pertanian/perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Pengurus Tim Penggerak PKK Kecamatan Tabukan Selatan.

Materi-materi yang disampaikan adalah:

Materi 1.	Pengelolaan SDA Kampung melalui: pembentukan Tata Kelola Ruang Kampung
Materi 2.	Pengelolaan SDA Kampung melalui: pembentukan Kawasan Konservasi Pesisir Kampung
Materi 3.	Pengelolaan SDA Kampung melalui: pengintegrasian kegiatan lingkungan kedalam RPJM Kampung dan RKP Kampung
Materi 4.	Harapan, Motivasi dan Kebijakan Pemerintah

	Kecamatan Tabukan Selatan dalam mengelola SDA di Kecamatan Tabukan Selatan
<p>Ringkasan proses workshop</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Workshop dimoderasi oleh Drs. George L. Pontoh (Sekretaris kecamatan Tabukan Selatan). ❖ Doa buka oleh S. L. Lesawengen (MTK Kampung Kalagheng). ❖ Penyampaian maksud workshop oleh Samsared B. Barahama: <ul style="list-style-type: none"> - Menyampaikan terima kasih kepada Camat Tabukan Selatan yang telah memfasilitasi pelaksanaan workshop. - Menyampaikan terima kasih kepada peserta yang berkenan hadir memenuhi undang, dan berpartisipasi dalam pelaksanaan workshop. - Workshop dilaksanakan sebagai wadah untuk berdiskusi mengenai pengelolaan SDA yang ada di Kecamatan Tabukan Selatan. - Menjelaskan tentang kegiatan fasilitasi di kampung Malamenggu dan Bukide yang menghasilkan Tata Kelola Ruang Kampung, yang intinya mau melestarikan Hutan Lindung Sahendarumang dan daerah tangkapan air, serta pengelolaan sumber daya alam yang memberikan manfaat bagi masyarakat. - Menjelaskan tentang kegiatan fasilitasi di Kampung Batuwingkung dan Lesabe yang menghasilkan Kawasan Konservasi Pesisir kampung Batuwingkung, dan telah ditetapkan dengan peraturan kampung. Dugong adalah pintu masuk dalam program pelestarian pesisir karena termasuk salah satu satwa dilindungi. - Kawasan koonservasi pesisir kampung Lesabe, belum terbentuk karena ada miskomunikasi kelompok dengan pemerintahan yang baru. - Menekankan dan mengharapkan, diakhir workshop ada kesepakatan bersama semua kampung tentang pengelolaan sumber daya alam di Kecamatan Tabukan Selatan. ❖ Arahan dan pembukaan oleh B. Dj. Winerungan (Camat Tabukan Selatan) <ul style="list-style-type: none"> - Kita harus bersyukur bahwa kita masih dapat menikmati kehidupan dari sumber daya alam yang ada disekitar kita. 	

- Melalui Perkumpulan Sampiri, kita akan belajar bagaimana cara pengelolaan SDA seperti yang sudah mereka lakukan di 2 (dua) kampung.
 - Kita harus menyadari bahwa kekayaan SDA yang ada sekarang ini, akan menjadi warisan kepada anak cucu. Karena itu sudah menjadi kewajiban kita untuk menjaganya.
 - Kita sering lupa melestarikan sumber daya alam, lewat workshop ini, kita diingatkan lagi, dan selanjutnya bisa mensosialisasikan pengelolaan dan pelestarian alam di kampung masing-masing.
 - Dengan kegiatan pelestarian, akan terjadi peningkatan kualitas sumber daya alam.
 - Kegiatan pengelolaan sumber daya alam diintegrasikan kedalam program kerja kampung-kampung yang ada di Kecamatan Tabukan Selatan.
- ❖ Sambutan oleh Ibu Ellen M. Hamel, S.Pi (Kepala Seksi Perencanaan Ruang Laut dan Konservasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Sangihe)
- Pembentukan kawasan konservasi pesisir di Batuwingkung dapat menjaga kelestarian perairan.
 - Diakhir kegiatan workshop, semoga bisa dihasilkan kesepakatan tentang pengelolaan sumber daya alam.
 - Pemerintah dan masyarakat, didorong bersama-sama mengawasi dan menjaga kelestarian alam.
 - Dalam mengawasi dan menjaga kelestarian alam khususnya pesisir, disetiap kampung bisa membentuk kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS).
 - POKMASWAS bisa beranggotakan 10 orang dengan persyaratan memasukan foto copy KTP.
 - Dengan workshop ini, bisa membentuk kesadaran akan pentingnya kelestarian alam khususnya pesisir.

❖ Materi 1. Pengelolaan SDA Kampung melalui pembentukan Tata Kelola Ruang Kampung, disampaikan oleh Samsared B. Barahama

Garis besar materi:

- Pengertian Tata Kelola Ruang Kampung
- Dasar pembentukan/penyusunan Tata Kelola Ruang Kampung
- Manfaat Tata Kelola Ruang Kampung bagi pemerintah dan masyarakat
- Contoh peta pola ruang, dan kawasan di dalamnya.
- Contoh program dan kegiatan yang sapat dilakukan pada setiap ruang.
- Tahapan penyusunan Tata Kelola Ruang Kampung
- Kelembagaan
- Contoh Peraturan Kampung Malamenggu tentang Tata Kelola Ruang Kampung

Tanggapan (tambahan):

1. Pejabat Kapitalaung Kampung Malamenggu Bapak Desiderius Pontoh:

- Di kampung Malamenggu sudah dibentuk Tata Kelola Ruang Kampung (TKRK).
- Program dan kegiatan sudah dimasukkan dalam RPJM Kampung, seperti kegiatan pembebasan lahan mata air, tapi belum masuk dalam pembiayaan APBK tahun 2017, dan akan diupayakan dapat masuk kedalam APBK 2018.
- Melalui TKRK bisa mempertajam penyusunan RPJM-Des
- Kelompok pengelola TKRK di Malamenggu, masih sedang dikaji pembentukannya.

❖ Materi 2. Pengelolaan SDA Kampung melalui pembentukan Kawasan Konservasi Pesisir Kampung, disampaikan oleh Samsared B. Barahama.

Garis besar mater:

- Perjalanan panjang menuju KKP, yang menceritakan tentang perubahan penggunaan istilah DPL menjadi KKP.
- Dasar pembangunan KKP

- Alasan pembangunan KKP
- Tujuan pembuatan KKP
- Keuntungan membangun KKP
- Proses membangun KKP
- Contoh KKP Batuwingkung
- Kelembagaan
- Dampak KKP di Batuwingkung
- Contoh Peraturan Kampung tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi Pesisir

Tanggapan:

1. Pejabat Kapitalaung Mandoi, **A.Tahulending:**

- KKP Kampung Batuwingkung harus dilanjutkan untuk disosialisasikan kepada masyarakat masing-masing kampung oleh pejabat kapitalaung yang hadir saat ini.
- Di Kampung Bentung juga terdapat habitat dugong dan diharapkan agar dapat dibentuk juga KKP untuk melestarikan hewan yang hampir punah ini.
- 7 kampung pesisir lainnya harus bentuk KKP agar adanya keberlanjutan sumber daya pesisir di Kecamatan Tabukan Selatan.

2. Kapitalaung Kampung Laotongan, **Sem G. Dalope:**

- Pemerintah kampung dan masyarakat Laotongan berkeinginan besar membuat perkam tentang KKP tapi sayangnya terhambat oleh belum adanya kejelasan tentang batas laut antar kampung di Kecamatan Tabukan Selatan.
- Melalui forum workshop dapat mengambil suatu kesepakatan batas wilayah laut masing-masing kampung sehingga dalam penentuan KKP tidak akan terjadi konflik batas.

3. Anggota Kelompok Cinta Laut (Mantan Kapitalaung dan sekretaris Kampung Batuwingkung), **Risno Mangune:**

- Pembentukan KKP tidak mudah seperti membalikan telapak

tangan. Banyak tantangan dan hambatan, bukan dari luar kampung, melainkan dari dalam kampung.

- Terbentuknya KKP di Kampung Batuwingkung, didukung Perkumpulan Sampiri
- KCL berterima kasih kepada semua pihak karena sudah ditetapkannya zona-zona dalam KKP.
- Sebelum ada KKP jumlah hasil tangkapan sedikit, dulunya sering mancing atau menebar jala di perairan pulau Beng Laut. Tapi sekarang mau cari 2 atau 3 loyang ikan hasil tangkapan pun sudah tidak membutuhkan waktu yang lama. Intinya KKP ini sangat besar dampak positifnya dimasyarakat.
- Kelompok Cinta Laut akan terus mengawasi KKP yang ada.
- Kendala yang dialami dalam pengelolaan dan pengawasan KKP di Batuwingkung adalah masih banyaknya perahu yang melintas di zona inti dan sebisa mungkin bisa dimasukkan ke dalam program kampung sehingga bisa dibiayai oleh dana kampung.

- ❖ Materi 3. Pengelolaan SDA Kampung melalui: pengintegrasian kegiatan lingkungan kedalam RPJM Kampung dan RKP Kampung, disampaikan oleh: Samsared B. Barahama.

Garis besar materi:

- Hakekat Pembangunan Kampung
- Alasan mengapa pembangunan kampung harus berbasis masyarakat
- Pembangunan kampung belum 100% berbasis masyarakat
- Mendorong pembangunan berbasis masyarakat dengan perencanaan masyarakat
- Mengintegrasikan pengelolaan SDA ke dalam RPJM dan RKP Kampung

- ❖ Materi 4. Harapan, Motivasi dan Kebijakan Pemerintah Kecamatan Tabukan Selatan dalam mengelola SDA di Kecamatan Tabukan Selatan, disampaikan oleh: Drs. George L. Pontoh.

Garis besar materi:

- Pemerintah Kampung jangan memprioritaskan pembangunan fisik saja
- Pemerintah Kampung juga harus memperhatikan kelestarian alam
- Harus ada pengelolaan Sumber Daya Alam yang baik, khususnya wilayah pesisir

❖ Identifikasi sumber daya alam

Pada sesi ini peserta diminta mengidentifikasi sumber daya alam apa saja yang ada di sekitar kampung. Melalui proses diskusi bersama, maka teridentifikasi daftar sumber daya alam, sebagai berikut: hutan lindung Sahendarumang, hutan mangrove, terumbu karang, padang lamun, mata air, sungai, lahan pertanian, pantai, air terjun, satwa liar, ikan, mamalia laut, potensi wisata, tempat bersejarah.

❖ Diskusi Kelompok

Setelah sumber daya alam teridentifikasi, selanjutnya peserta dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 terdiri dari para Kapitaluang, Kelompok 2 terdiri dari para Sekretaris Kampung dan kelompok 3 terdiri dari anggota MTK dan undangan lain.

Setiap kelompok ditugaskan untuk membahas kesepakatan pengelolaan bagi setiap sumber daya alam yang sudah teridentifikasi dengan pembagian yang berbeda pada setiap kelompok.

Setelah berdiskusi, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya, dan dilakukan pembahasan bersama.

❖ Penutup

Workshop ditutup oleh Sekretaris Kecamatan Tabukan Selatan, Drs. George L. Pontoh. Dalam kata-kata penutupan, disampaikan beberapa hal penting sebagai penekanan kepada peserta:

- Hasil workshop harus ditindaklanjuti oleh masing-masing kampung.
- Kita sepakat untuk setiap kampung harus memiliki kawasan konservasi atau kawasan lindung. Apakah berupa hutan lindung, daerah mata air, mangrove, dan lain-lain.

- Semua kampung dipesisir wajib membangun kawasan konservasi.
- Terima kasih kepada semua peserta yang sudah hadir, dan kepada penyelenggara Perkumpulan Sampiri, Perkumpulan Yapeka, Burung Indonesia-CEPF.

Setelah melalui proses penyajian materi, diskusi dan pembahasan, maka workshop menghasilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Peserta dapat mengidentifikasi sumber daya alam yang ada di sekitar kampung, yaitu: hutan lindung Sahendarumang, hutan mangrove, terumbu karang, padang lamun, mata air, sungai, lahan pertanian, pantai, air terjun, satwa liar, ikan, mamalia laut, potensi wisata, tempat bersejarah.

2. Hasil diskusi dan pembahasan kelompok Kapitalaung

SUMBER DAYA ALAM	HASIL DISKUSI
Hutan Lindung Sahendrumang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak membuka lahan pertanian dan perkebunan di dalam kawasan hutan lindung Sahendarumang. 2. Tidak melakukan perburuan satwa. 3. Tidak menebang pohon yang memiliki nilai ekonomi (gaharu). 4. Membuat tanda batas hutan lindung Sahendarumang dengan pemukiman penduduk. 5. Melakukan sosialisasi tentang pentingnya kawasan hutan lindung kepada masyarakat kampung dan masyarakat diluar kampung. 6. membuat kesepakatan bersama kapitalaung yang berbatasan dengan kawasan hutan lindung tentang pelestarian hutan lindung Sahendarumang. 7. Membuat Peraturan kampung tentang pelestarian hutan lindung Sahenderumang.
Mata air	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak menebang pohon atau membuka lahan pertanian dan perkebunan dalam radius 50-200

	<p>meter dari mata air.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Tidak menggunakan pupuk kimia pada lahan pertanian di atas mata air. 3. Membangun kesepakatan/peraturan bersama kapitalaung tentang pemanfaatan sumber mata air oleh kampung tetangga. 4. Mempertimbangan retribusi atau kompensasi atas pemanfaatan mata air oleh kampung tetangga. 5. Kompensasi atas pemanfaatan mata air dapat berupa kegiatan pelestarian daerah tangkapan air. 6. Melakukan penghijauan di sekitar mata air dengan jenis pohon yang kurang dimanfaatkan batang kayunya, seperti pohon Beringin. 7. Melakukan pembebasan lahan mata air. 8. Membangun komitmen kampung lokasi sumber mata air dalam menjaga dan memelihara jaringan air kampung tetangga.
Sungai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menanam pohon (penghijauan) di sepanjang sungai. 2. Tidak menebang pohon pada jarak 5-10 m dari pinggir sungai. 3. Tidak membuang sampah/limbah sembarangan (misalnya: limbah pengelolaan sagu). 4. Tidak menggunakan bahan kimia /racun di sungai 5. Membuat tempat pembuangan sampah dirumah masing-masing atau pada suatu kelompok pemukiman. 6. Membuat Peraturan kampung.
Lahan Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengarahkan petani agar tidak membuka lahan pada daerah rawan longsor. 2. Mengarahkan petani agar mengolah lahan pertanian secara menetap dan tidak berpindah-pindah. 3. Mengarahkan petani menanam satu jenis tanaman unggulan pada satu kawasan lahan

	pertanian. 4. Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang fungsi dan pemanfaatan lahan pertanian. 5. Membuat Peraturan kampung. 6. Memanfaatkan lahan tidur.
3. Hasil diskusi dan pembahasan kelompok sekretaris kampung	
SUMBER DAYA ALAM	HASIL DISKUSI
Hutan Mangrove	1. Membuat peraturan kampung untuk perlindungan mangrove. 2. Menjadikan hutan mangrove sebagai objek wisata. 3. Menjadikan hutan mangrove sebagai tempat budidaya ikan.
Terumbu karang	1. Menerima Kawasan Konservasi Pesisir Kampung Batuwingkung diterima semua kampung di Kecamatan Tabukan Selatan. 2. Membuat terumbu karang buatan, untuk rehabilitasi karang. 3. Setiap kampung membangun kawasan konservasi 4. Teluk Tamawa yang berada di kampung Lesabe, Bulu, Binebas, Kalagheng, dan Hangke dikelola bersama. 5. Bila ada kampung yang membuat Kawasan Konservasi Pesisir, kampung lain harus menghormati peraturan di kampung yang mengatur tentang kawasan konservasi tersebut. 6. Kampung dapat membangun ekowisata kampung. 7. Kampung dapat membentuk kelompok pelestari terumbu karang.
Padang lamun	1. Menjaga keseimbangan ekosistem laut. 2. Melestarikan tempat makan ikan, mamalia laut dan biota laut lainnya.
Pantai	1. Dalam hal pemanfaatan pasir disuatu kampung oleh kampung lain perlu diatur dalam keputusan bersama antar kampung.

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Menjadikan pantai sebagai tempat ekowisata. 3. Menjaga kebersihan pantai. 4. Membuat peraturan kampung.
Tempat bersejarah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melestarikan tempat-tempat bersejarah.

4. Hasil diskusi dan pembahasan kelompok Majelis Tua Kampung

SUMBER DAYA ALAM	HASIL DISKUSI
Air terjun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga kebersihan air terjun. 2. Menjaga kelestarian pohon disekitar air terjun. 3. Pengunjung yang akan berwisata ke air terjun harus melapor ke pemerintah kampung setempat. 4. Membuat papan informasi tentang pelestarian air terjun.
Satwa liar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak memburu satwa langka 2. Membuat peraturann kampung tentang larangan membunuh hewan-hewan langka. 3. Membuat papan informasi tentang pelestarian satwa liar.
Jenis Ikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak menangkap ikan napoleon (maming). 2. Tidak menangkap penyu 3. Tidak menagkap ikan dengan menggunakan racun (seperti: potassium, lawuo) 4. Tidak menagkap ikan atau hewan laut yang dilindungi.
Mamalia laut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak menangkap mamalia laut seperti duyung, paus, lumba-lumba. 2. Mamalia laut yang tidak sengaja terperangkap jaring, dan masih hidup harus dilepas.
Potensi wisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Potensi wiisata di kecamatan Tabukan Selatan harus dilestarikan. 2. Setiap kampung didorong membangun wisata kampung.

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Pengunjung yang datang ketempat wisata harus melapor ke pemerintah kampung setempat. 4. Masyarakat didorong untuk menghargai adat dan budaya di tempat wisata. 5. Menjaga kebersihan lokasi wisata. 	
<p style="text-align: center;">KESEPAKATAN ANTAR KAMPUNG KECAMATAN TABUKAN SELATAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melestarikan hutan lindung Sahendarumang sebagai hutan asli yang menjadi habitat bagi berbagai jenis satwa liar yang endemik, dilindungi dan menjadi kekayaan daerah dan kekayaan dunia. 2. Melestarikan satwa liar, dengan menjaga habitat dan mengurangi tekanan bagi populasi, demi keseimbangan kehidupan di alam. 3. Melestarikan daerah tangkapan air, mata air dan sungai untuk menjamin ketersediaan air dimasa depan. 4. Memanfaatkan lahan pertanian dan perkebunan secara optimal dengan memanfaatkan lahan tidur, mengembangkan cara pertanian yang menetap, menggunakan pupuk alami/organik yang sehat. 5. Kawasan Konservasi Pesisir Batuwingkung, diterima oleh kampung tetangga di Kecamatan Tabukan Selatan. 6. Teluk Tamawa di wilayah kampung Lesabe, Bulu, Binebas, Kalagheng dan hangke, dikelola bersama. 7. Kampung yang berada di pesisir, wajib membentuk Kawasan Konservasi Pesisir. 8. Setiap kampung menghormati dan menerima segala ketentuan yang mengatur tentang kawasan konservasi pesisir dengan mempertimbangkan kelestarian kehidupan ekosistem pesisir, dan kesejahteraan nelayan. 9. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam kampung lain, harus disertai dengan pembuatan kesepakatan atau peraturan bersama dengan kampung lokasi sumber daya alam itu berada. 10. Setiap kampung melestarikan dan mengembangkan potensi wisata 		

kampung untuk kesejahteraan masyarakat.

11. Setiap kampung membentuk kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS).
12. Membangun usaha ekonomi produktif dan inovatif untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya alam secara arif dan bijaksana.
13. Perairan disekitar Batu Malitekang sebagai pemersatu masyarakat Kecamatan Tabukan Selatan sehingga harus dikelola bersama oleh semua kampung.
14. Pemanfaatan sumber material galian C harus diatur dalam sebuah regulasi yang jelas dengan mempertimbangkan kondisi alam sekitar kampung.
15. Setiap kampung wajib memiliki wilayah administrasi kampung yang pasti dan tegas.

RENCANA TINDAKLANJUT

1. Kampung mengimplementasikan komitmen kesepakatan workshop dengan mengintegrasikan inisiatif program dan kegiatan yang teridentifikasi, ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kampung dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kampung.
2. Inisiatif program dan kegiatan yang dapat diadopsi atau direplikasi, adalah sebagai berikut:

Kesepakatan	Inisiatif Program dan Kegiatan
<p>Melestarikan hutan lindung Sahendarumang sebagai hutan asli yang menjadi habitat bagi berbagai jenis satwa liar yang endemik, dilindungi dan menjadi kekayaan daerah dan kekayaan dunia.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak membuka lahan pertanian dan perkebunan di dalam kawasan hutan lindung Sahendarumang. 2. Tidak melakukan perburuan satwa. 3. Tidak menebang pohon yang memiliki nilai ekonomi (gaharu). 4. Membuat tanda batas hutan lindung Sahendarumang dengan pemukiman penduduk.

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Melakukan sosialisasi tentang pentingnya kawasan hutan lindung kepada masyarakat kampung dan masyarakat diluar kampung. 6. membuat kesepakatan bersama kapitalaung yang berbatasan dengan kawasan hutan lindung tentang pelestarian hutan lindung Sahendarumang. 7. Membuat Peraturan kampung tentang pelestarian hutan lindung Sahenderumang.
<p>Melestarikan satwa liar, dengan menjaga habitat dan mengurangi tekanan bagi populasi, demi keseimbangan kehidupan di alam.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak memburu satwa langka 2. Membuat peraturann kampung tentang larangan membunuh hewan-hewan langka. 3. Membuat papan informasi tentang pelestarian satwa liar. 4. Tidak menangkap ikan napoleon (maming). 5. Tidak menangkap penyu 6. Tidak menagkap ikan dengan menggunakan racun (seperti: potassium, lawuo) 7. Tidak menagkap ikan atau hewan laut yang dilindungi. 8. Tidak menangkap mamalia laut seperti duyung, paus, lumba-lumba. 9. Mamalia laut yang tidak sengaja terperangkap jaring, dan masih hidup harus dilepas.
<p>Melestarikan daerah tangkapan air, mata air dan sungai untuk menjamin ketersediaan air dimasa depan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak menebang pohon atau membuka lahan pertanian dan perkebunan dalam radius 50-200 meter dari mata air. 2. Tidak menggunakan pupuk kimia pada lahan pertanian di atas mata air. 3. Membangun kesepakatan/peraturan bersama kapitalaung tentang pemanfaatan sumber mata air oleh kampung tetangga. 4. Mempertimbangan retribusi atau kompensasi atas pemanfaatan mata air oleh kampung tetangga.

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Kompensasi atas pemanfaatan mata air dapat berupa kegiatan pelestarian daerah tangkapan air. 6. Melakukan penghijauan di sekitar mata air dengan jenis pohon yang kurang dimanfaatkan batang kayunya, seperti pohon Beringin. 7. Melakukan pembebasan lahan mata air. 8. Membangun komitmen kampung lokasi sumber mata air dalam menjaga dan memelihara jaringan air kampung tetangga. 9. Menanam pohon (penghijauan) di sepanjang sungai. 10. Tidak menebang pohon pada jarak 5-10 m dari pinggir sungai. 11. Tidak membuang sampah/limbah sembarangan (misalnya: limbah pengelolaan sagu). 12. Tidak menggunakan bahan kimia /racun di sungai 13. Membuat tempat pembuangan sampah dirumah masing-masing atau pada suatu kelompok pemukiman. 14. Membuat Peraturan kampung. pembebasan lahan disekitar mata air 15. bekerja sama dengan PDAM 16. Kampung mandoi dan birahi akan membebaskan lahan mata air yang berada diwilayah kampung malamenggu
<p>Memanfaatkan lahan pertanian dan perkebunan secara optimal dengan memanfaatkan lahan tidur, mengembangkan cara pertanian yang menetap, menggunakan pupuk</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengarahkan petani agar tidak membuka lahan pada daerah rawan longsor. 2. Mengarahkan petani agar mengolah lahan pertanian secara menetap dan tidak berpindah-pindah. 3. Mengarahkan petani menanam satu jenis tanaman unggulan pada satu kawasan lahan pertanian.

alami/organik yang sehat.	<ol style="list-style-type: none"> 4. Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang fungsi dan pemanfaatan lahan pertanian. 5. Membuat Peraturan kampung. 6. Memanfaatkan lahan tidur.
Kawasan Konservasi Pesisir Batuwingkung, diterima oleh kampung tetangga di Kecamatan Tabukan Selatan.	
Teluk Tamawa di wilayah kampung Lesabe, Bulu, Binebas, Kalagheng dan hangke, dikelola bersama.	
Kampung yang berada di pesisir, wajib membentuk Kawasan Konservasi Pesisir.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat peraturan kampung untuk perlindungan mangrove. 2. Menjadikan hutan mangrove sebagai objek wisata. 3. Menjadikan hutan mangrove sebagai tempat budidaya ikan. 4. Menerima Kawasan Konservasi Pesisir Kampung Batuwingkung diterima semua kampung di Kecamatan Tabukan Selatan. 5. Membuat terumbu karang buatan, untuk rehabilitasi karang. 6. Setiap kampung membangun kawasan konservasi 7. Teluk Tamawa yang berada di kampung Lesabe, Bulu, Binebas, Kalagheng, dan Hangke dikelola bersama. 8. Bila ada kampung yang membuat Kawasan Konservasi Pesisir, kampung lain harus menghormati peraturan di kampung yang mengatur tentang kawasan konservasi tersebut. 9. Kampung dapat membangun ekowisata kampung.

	<ol style="list-style-type: none"> 10. Kampung dapat membentuk kelompok pelestari terumbu karang. 11. Menjaga keseimbangan ekosistem laut. 12. Melestarikan tempat makan ikan, mamalia laut dan biota laut lainnya. 13. Dalam hal pemanfaatan pasir disuatu kampung oleh kampung lain perlu diatur dalam keputusan bersama antar kampung. 14. Menjadikan pantai sebagai tempat ekowisata. 15. Menjaga kebersihan pantai. 16. Membuat peraturan kampung.
<p>Setiap kampung menghormati dan menerima segala ketentuan yang mengatur tentang kawasan konservasi pesisir dengan mempertimbangkan kelestarian kehidupan ekosistem pesisir, dan kesejahteraan nelayan.</p>	
<p>Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam kampung lain, harus disertai dengan pembuatan kesepakatan atau peraturan bersama dengan kampung lokasi sumber daya alam itu berada.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Lesabe I dan Lesabe Induk dapat duduk bersama dalam pembahasan pelestarian lingkungan
<p>Setiap kampung melestarikan dan mengembangkan potensi wisata kampung untuk kesejahteraan masyarakat.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melestarikan tempat-tempat bersejarah. 2. Menjaga kebersihan air terjun. 3. Menjaga kelestarian pohon disekitar air terjun. 4. Pengunjung yang akan berwisata ke air terjun harus melapor ke pemerintah kampung setempat. 5. Membuat papan informasi tentang pelestarian air

	<p>terjun.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Potensi wisata di kecamatan Tabukan Selatan harus dilestarikan. 7. Setiap kampung didorong membangun wisata kampung. 8. Pengunjung yang datang ketempat wisata harus melapor ke pemerintah kampung setempat. 9. Masyarakat didorong untuk menghargai adat dan budaya di tempat wisata. 10. Menjaga kebersihan lokasi wisata. 11. Tempat bersejarah di binebas, ditanjung melepe, bagaimana didepannya dibuat KKP dan dibuat tempat wisata.
Setiap kampung membentuk kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tiap-tiap kampung mengusulkan nama-nama pengurus dan anggota kelompok masyarakat pengawas, dan diusulkan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Sangihe. 2. Melaksanakan pelatihan bagi POKMASWAS. 3. Penyusunan rencana kerja POKMASWAS. 4. Evaluasi laporan POKMASWAS.
Membangun usaha ekonomi produktif dan inovatif untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya alam secara arif dan bijaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk Bumdes bersama dengan focus konservasi 2. Tahun 2018 akan ada Bumdes bersama di Kecamatan Tabukan Selatan Jarring apung harus diintegrasikan ke dalam RKP
Perairan disekitar Batu Malitekang sebagai pemersatu masyarakat Kecamatan Tabukan Selatan sehingga harus dikelola bersama oleh semua kampung.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Harus membuat kesepakatan pengelolaan Sumber Daya Alam antar Kampung mengenai penangkapan ikan disekitar wilayah perairan Malitekang 2. Kesepakatan pengelolaan wilayah sekitar Malitekang harus secepatnya dibahas. Menurut sejarah, Malitekang milik wilayah administrasi Kampung Bentung Masalah Malitekang

	sebaiknya mengundang Kapitalaung-Kapitalaung lama untuk mengetahui sejarah Malitekang. 3. Malitekang kita buat KKP tapi di towoe dibebaskan. 4. Dibuatkan prasasti 14 kampung di Malitekang. 5. <i>Mailokang petatiwakeng kasasembaukangu palahentone</i> , tulisan prasasti.
Pemanfaatkan sumber material galian C harus diatur dalam sebuah regulasi yang jelas dengan mempertimbangkan kondisi alam sekitar kampung.	1. Lesabe 1, membuat aturan tentang galian c (penambangan batu)
Setiap kampung wajib memiliki wilayah administrasi kampung yang pasti dan tegas.	1. Kampung Kalagheng akan melaksanakan musyawarah penetapan batas Kampung Pelaksanaan musyawarah pada bulan November 2017. 2. Palareng RKP 2018 akan melaksanakan pemetaan Kampung.

2. Workshop membangun kesepahaman tentang pengelolaan hutan lindung Sahendrumang

Pada tanggal 7 Juni 2018, dilaksanakan Workshop Membangun Kesepahaman Pengelolaan dan Penataan Ruang Kelola Hutan Lindung Sahendarumang II. Peserta yang ikut berpartisipasi hadir dalam workshop sebanyak 76 orang, laki-laki 62 orang, perempuan 14 orang, dari Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Utara, Polisi Kehutanan Propinsi Sulawesi Utara, Unit Pelaksana Tugas Dinas Propinsi Sulawesi Utara Kesatuan Pengelola Hutan Lindung Wilayah-III, Bapelitbang Kabupaten Kepulauan Sangihe, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Dinas Pariwisata, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Camat-Camat, Kepala-kepala Kampung, Tokoh

Masyarakat Kampung, Burung Indonesia, dan Perkumpulan Sampiri. Untuk membuka wawasan dalam melahirkan pemahaman yang sama terhadap keberadaan hutan lindung Sahendarumang II, disajikan materi yang disampaikan oleh pemateri, masing-masing sebagai berikut:

- Materi I. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe (RTRW) Tahun 2014 – 2034, disampaikan oleh Ibu Engelin Sasiang ST, MM, Kepala Bidang Perencanaan pengembangan wilayah dan infrastruktur Bapelitbang Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- Materi II. Profi UPTD KPHL Wilayah III Sangihe, Sitaro dan Talaud, disampaikan oleh Bapak Djainudin Janis, Kepala UPTD Wilayah III Sangihe, Sitaro dan Talaud.
- Materi III. Kawasan Hutan Lindung Sahendarumang Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, disampaikan oleh Ir. Moudy Togas MSi Kepala Seksi PKPH.
- Materi IV. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, disampaikan oleh Dermanto Nasirun, S.Pd, Bina Polisi Kehutanan Sulawesi Utara.
- Materi V. Nilai Penting Keragaman Hayati Hutan Lindung Gunung Sahendarumang, disampaikan oleh Adi Widyanto dari Burung Indonesia.
- Materi VI. Menata Ruang Kelola Hutan Lindung Sahendarumang II, disampaikan oleh Samsared Barahama S.Pd Direktur Perkumpulan Sampiri.

Setelah penyajian materi dan diskusi, dihasilkan kesimpulan, antara lain:

1. Disepakati penggunaan kata Sahendarumang, untuk penyebutan nama hutan Lindung.
2. Bapelitbang akan mengakomodir hasil pendataan kawasan hutan lindung, untuk menjadi materi dalam perubahan Perda No. 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2014-2034.

3. Peserta workshop terutama camat-camat dan kepala kampung mengakui adanya kawasan hutan lindung Sahendarumang yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor:734/Menhut/II/Tahun 2014 Tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sulawesi Utara, dan mendorong dilakukan pendataan kawasan hutan lindung Sahendarumang II yang dilakukan bersama-sama dengan pemerintah kampung dan masyarakat.
 4. Setelah workshop, kegiatan yang akan dilakukan selanjutnya adalah: pertemuan di tingkat kecamatan, pertemuan kampung, dan pendataan kawasan hutan lindung Sahendarumang II.
Pemerintah kampung berkomitmen membantu pelaksanaan pendataan kawasan hutan lindung Sahendarumang II di kampungnya masing-masing.
3. Diseminasi hasil pendataan pendataan hutan lindung Sahendarumang dan penataan wilayah administrasi kampung
- Sebagai tindaklanjut kegiatan workshop, dilakukan rapat koordinasi di kecamatan dan pertemuan sosialisasi di kampung secara marathon, serta pendataan dan penataan kawasan hutan lindung Sahendarumang oleh Perkumpulan Sampiri, bersama-sama dengan pemerintah kampung dan masyarakat di 27 kampung.
- Hasil kegiatan pendataan hutan lindung berbasis kampung dan penataan wilayah administrasi kampung perlu disosialisasikan agar diketahui segenap stakeholder, maka Perkumpulan Sampiri melakukan diseminasi hasil kegiatan pendataan dan penataan.
- Tujuan diseminasi ini adalah hasil pendataan dan penataan diakui oleh semua stakeholder di Kabupaten Kepulauan Sangehe, Kecamatan dan Kampung yang memiliki kawasan hutan lindung dalam wilayah administrasinya sehingga data yang diperoleh menjadi data yang permanen untuk digunakan sebagai referensi dalam pengelolaannya.

Keluaran

1. Pemangku kepentingan mengetahui hasil pendataan dan penataan kawasan hutan lindung Sahendarumang II.
2. Hasil pendataan diterima oleh semua stakeholder terutama pemerintah kampung dan pemerintah kabupaten.
3. Adanya sebuah dokumen sebagai kesepakatan bersama terhadap hasil pendataan dan penataan kawasan hutan lindung Sahendarumang II.
4. Adanya solusi terhadap persoalan batas antar kampung.
5. Adanya kesepakatan penanaman tanaman batas hutan asli yang masih tersisa.

Diseminasi dilaksanakan di ruang serba guna kantor Bupati, pada hari Selasa, 30 Oktober 2018.

Diseminasi dibuka oleh Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah didampingi oleh Kepala Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam.

Materi dan Pemateri

No	Materi	Pemateri
1	Laporan pelaksanaan dan hasil penataan dan pendataan kawasan hutan lindung Sahendarumang II.	Perkumpulan Sampiri
2	Tanggapan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara dan Balai Pemetaan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Utara terhadap hasil pendataan dan penataan kawasan hutan lindung Sahendarumang II.	Kepala UPTD KPHL Wilayah III Sangihe-Talaud-Sitaro
3	Tanggapan Bapelitbang	Kepala Bidang Perencanaan

	terhadap hasil pendataan dan penataan kawasan hutan lindung Sahendarumang II.	pengembangan wilayah dan infrastruktur Bapelitbang Kabupaten Kepulauan Sangihe
4	Membangun Keputusan Bersama Kapitalaung dalam menyelesaikan konflik batas kampung. (Cerita sukses dari kecamatan Nusa Tabukan)	Kapitalaung Bukide
5	Rencana tindaklanjut	Perkumpulan Sampiri

Peserta

Dinas Kehutanan Propinsi/ UPTD KPHL W-III, Bapelitbang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Camat-Camat, Kepala-kepala Kampung, Burung Indonesia, Perkumpulan Sampiri

Hasil kegiatan diseminasi adalah:

1. Data hasil pendataan kawasan hutan lindung Sahendarumang diterima menjadi data awal bagi stakeholder untuk menentukan kebijakan.
2. Mengkomunikasikan hasil pendataan kawasan hutan lindung Sahendarumang dengan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) wilayah VI Sulawesi Utara.
3. Perlu dibangun mekanisme pengelolaan kebun atau lahan yang masuk dalam kawasan lindung dengan skema pengelolaan perhutanan sosial.
4. Perlu dikaji untuk peninjauan ulang batas kawasan hutan lindung Sahendarumang II.
5. Perlu melakukan komunikasi dengan Badan Informasi Geo spasial (BIG), untuk otorifikasi hasil pendataan, sesuai dengan UUD 4 tahun 2011.
6. Penanaman tanaman batas hutan primer, dilakukan oleh kampung melalui kegiatan penyiapan bibit dan penanaman pohon bamboo.
7. Deklarasi kepala kampung:

- a. Komitmen kampung dalam melestarikan hutan lindung saendarumang karena memahami betapa pentingnya hutan lindung bagi kehidupan manusia, satwa dan tumbuhan yang menjadi pendukung keseimbangan alam.
 - b. Menghormati Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 734/Menhut/II/Tahun 2014 tentang kawasan hutan dan konservasi perairan provinsi sulawesi utara, yang didalamnya mengatur batas wilayah kelola hutan lindung saendarumang.
 - c. Berpartisipasi melaksanakan program pelestarian hutan lindung yang diintegrasikan dalam pembangunan kampung.
8. Menyampaikan kepada pemerintah daerah tentang konflik batas wilayah administrasi kampung sehingga mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.

4. Koordinasi dengan KPHL

Diskusi dengan KPHL Wilayah III Sangihe, Talaud, dan Sitaro, tentang rencana kegiatan di Sahendarumang, dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2018, bertempat di kantor KPHL Wilayah III Sangihe, yang dihadiri oleh Sam, Jhonli, Taufiq, Rivi (Sampiri), Azhar, Melky, Iskandar, Yaner, I Gusti, Mohamad (KPHL).

Agenda: pembahasan lanjutan rencana kegiatan bersama di Sahendarumang II .

Hasil Pembahasan:

1. Memahami bersama kondisi Kawasan Hutan Lindung Sahendaruman saat ini adalah sebagai berikut:
 - a. Status Kawasan Hutan Lindung Sahendaruman II sudah diperkuat lagi dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor:734/Menhut/II/Tahun 2014 Tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sulawesi Utara. Luas Kawasan Hutan Lindung Sahendaruman II adalah 3.487,818 Ha. Menurut staf KPHL, tidak ada perubahan luasan hutan dari surat keputusan sebelumnya . Namun dari catata Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 452/Kpts-II/1999, luas kawasan Hutan Lindung Sahendaruman II adalah 3.549 hektar. Tentang selisih perbedaan luasan sebesar 61,182 ha ini belum

didiskusikan.

- b. Kawasan Hutan Lindung Sahendaruman tidak semuanya berbentuk tutup hutan, melainkan sudah terbagi menjadi 3 ruang pemanfaatan yaitu ruang hutan asli dan hutan sekunder, ruang yang berfungsi sebagai area pertanian dan perkebunan, dan ruang pemukiman.
 - c. Hutan asli merupakan habitat bagi burung khas Sangihe dan satwa liar lainnya yang penting untuk dilestarikan.
 - d. 3 Kondisi ruang tersebut terjadi sebelum dilakukan penetapan kawasan hutan lindung Sahendaruman II.
 - e. Pada tahun 1995, terjadi konflik tata batas hutan lindung Sahendaruman II, yang menyebabkan masyarakat belum menerima dengan baik keberadaan dan penetapan kawasan hutan lindung.
 - f. Dari pengalaman perkumpulan Sampiri, masih ada peluang untuk masuk ke masyarakat dalam rangka memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat tentang hutan lindung Sahendaruman.
 - g. Beberapa kampung telah memahami adanya kawasan hutan lindung, namun belum tahu batasnya, dan belum tahu apa yang harus dibuat dalam kawasan lindung.
 - h. Banyak program pemerintah yang kurang mendukung pelestarian dan pengelolaan kawasan hutan Lindung Sahendaruman II.
 - i. Pemanfaatan dana desa untuk program di desa, berpotensi menjadi ancaman bagi keberadaan kawasan hutan Lindung Sahendaruman II. Ancaman ini antara lain yakni jika dana desa dialokasikan untuk membangun jalan produksi, atau jalan setapak mendekati kawasan hutan asli.
 - j. Pengelolaan Hutan Lindung Sahendaruman II oleh stakeholder baik pemerintah, lembaga swasta, LSM, dan desa, belum terkoordinasi dengan baik. Mengakibatkan kondisi kawasan hutan Lindung Sahendaruman II semakin terancam keberadaannya.
2. Dipahami bahwa antara UPTD KPHL Wilayah III dengan Perkumpulan Sampiri memiliki visi dan program yang mendukung pelestarian Hutan Lindung

Sahendaruman, yaitu:

- a. Pada tahun 2018 ada program UPTD KPHL Wilayah III Sangihe yaitu menerapkan skema perhutanan sosial di beberapa desa seperti Desa Lelipang Kecamatan Tamako, Desa Bukide Kecamatan Tabukan Selatan
 - b. Pada tahun 2018 ada program Perkumpulan Sampiri yaitu pelestarian Sahendaruman untuk pelestarian burung khas dan jasa lingkungan secara berkesinambungan.
 - c. Visi yang sama antara KPHL sebagai institusi yang berwenang terhadap kawasan Hutan Lindung Sahendaruman dan Perkumpulan Sampiri, berpotensi untuk mengembangkan program kolaborasi.
 - d. Program kolaborasi ini perlu dikuatkan dengan pembentukan MoU atau kesepakatan kerjasama antara UPTD KPHL atau Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara dengan Perkumpulan Sampiri, sehingga masing-masing lembaga memahami tugas, fungsi, peran, dan bertanggung jawabnya, serta memungkinkan untuk melakukan sharing dana bagi kegiatan. Hasil program dimanfaatkan bersama untuk pengembangan program dan untuk pengambilan keputusan yang strategis.
 - e. Dalam pelaksanaan program pelestarian Hutan Lindung Sahendaruman Perkumpulan Sampiri didukung oleh Burung Indonesia. Burung Indonesia berperan aktif sejak tahun 2001, dan sampai saat ini tetap konsisten dan berkomitmen membantu mengembangkan program pelestarian hutan lindung Sahendaruman.
3. Berdasarkan kondisi kawasan hutan Lindung Sahendaruman saat ini, didukung dengan visi dan program KPHL, Perkumpulan Sampiri menawarkan sebuah skema perencanaan pengelolaan Sahendaruman, yang dapat mewujudkan kondisi sebagai berikut:
- a. Terpetakannya ruang kelola kawasan hutan lindung Sahendaruman II, yang terdiri dari ruang hutan asli, ruang perhutanan sosial, dan ruang pemukiman, yang disepakati masyarakat desa.
 - b. Penataan kawasan ruang kawasan hutan lindung Sahendaruman harus disepakati masyarakat. Kesepakatan ini merujuk kepada Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Dalam Undang-Undang ini, dinyatakan bahwa desa harus memiliki batas yang jelas. Nah, kawasan hutan Lindung Sahendaruman adalah bagian dari wilayah desa yang diakui oleh Undang-Undang. Oleh karena itu, untuk mensinkronkan antara UU No. 6/2014 dengan UU No. 41/ Tentang Kehutanan dan penerapan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor:734/Menhut/II/Tahun 2014, maka perlu ada kesepakatan bersama di tingkat masyarakat, sehingga konflik antara masyarakat desa dengan pemerintah tidak terjadi.

- c. Setiap ruang (hutan asli, kawasan perhutanan sosial, dan pemukiman), dikelola dengan baik oleh stakeholder sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya, melalui program yang terkoordinasi.
 - d. Stakeholder yang berkepentingan antara lain: Pemerintah (pusat, propinsi, dan kabupaten), swasta, NGO, Kelompok Pemerhati Lingkungan, dan masyarakat desa.
 - e. KPHL akan menjadi leading sektor yang akan mengkoordinir semua program stakeholder dalam konteks pelestarian hutan lindung Sahendaruman.
4. Terhadap skema perencanaan pengelolaan Sahendaruman, dan kondisi yang ingin diwujudkan (pada point 3) yang ditawarkan Perkumpulan Sampiri, pihak KPHL sangat mendukung. Alasannya, jika skema ini berhasil:
- a. KPHL Wilayah III memiliki data yang jelas tentang kondisi kawasan Hutan Lindung Sahendaruman.
 - b. Sebagai landasan faktual untuk pengambilan keputusan yang strategis.
 - c. Menjadi referensi untuk intervensi program.
 - d. Menjadi alat monitoring pelaksanaan konservasi kawasan Hutan Lindung Sahendaruman.
 - e. Menjadi contoh yang dapat diterapkan di lokasi lain yaitu Talaud dan Sitaro.
5. Strategi menjalankan skema ini adalah:
- a. Membangun pemahaman bersama tentang fungsi kawasan hutan lindung Sahendaruman II.

- b. Membangun pemahaman bersama untuk melakukan penataan ruang kawasan hutan lindung, sesuai kondisi yang ada.
- c. Melakukan pendataan dan penataan kawasan hutan lindung Sahendaruman II, sesuai dengan kondisi yang ada.
- d. Menetapkan ruang kelola kawasan hutan lindung Sahendaruman II, melalui suatu surat keputusan yang berkekuatan hukum.
- e. Mengembangkan program kolaborasi stakeholder di kawasan hutan lindung Sahendarumang.

6. Strategi tersebut diatas akan dilaksanakan dengan kegiatan:

- a. Workshop pemangku kepentingan dalam pengelolaan Sahendaruman tingkat Propinsi dan Kabupaten.
- b. Workshop pemangku kepentingan dalam pengelolaan Sahendaruman tingkat desa.
- c. Musyawarah desa dalam membangun pemahaman bersama tentang kawasan hutan lindung, fungsi, pendataan dan penataan kawasan hutan Lindung Sahendaruman II. Diharapkan dari musyawarah ini ada kesepakatan bersama.
- d. Pendataan (survey) batas hutan asli di Sahendaruman II, pengolahan data, dan laporan hasil.
- e. Mendorong terbentuknya suatu keputusan yang berkekuatan hukum dari pemerintah propinsi atau pemerintah pusat tentang ruang kelola kawasan hutan lindung Sahendarumang berdasarkan hasil pendataan dan penataan kawasan yang disepakati masyarakat.
- f. Pengadaan bibit bambu, sebagai pohon batas hutan asli.
- g. Penanaman pohon batas hutan asli bersama masyarakat.

7. Jadwal tentative pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Waktu	Yang Terlibat
1	Workshop pemangku kepentingan dalam	Diantara tgl 18-23 Mei	Dinas Kehutanan Propinsi/ UPTD KPHL III, Bapelitbang, Dinas

	<p>pengelolaan Sahendaruman tingkat Propinsi dan Kabupaten.</p>		<p>Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, camat, Burung Indonesia, dan Perkumpulan Sampiri.</p>
2	<p>Workshop pemangku kepentingan dalam pengelolaan Sahendaruman tingkat desa.</p>	<p>Diantara tgl 4-9 Juni</p>	<p>Camat, kepala desa, dan MTK.</p>
4	<p>Musyawarah desa dalam membangun pemahaman bersama tentang kawasan hutan lindung, fungsi, pendataan dan penataan kawasan hutan Lindung Sahendaruman II.</p>	<p>Juni - Juli</p>	<p>Pemerintah desa dan masyarakat di 24 desa.</p>
5	<p>Pendataan (survey) batas hutan asli di Sahendaruman II, pengolahan data, dan laporan hasil</p>	<p>Juli</p>	<p>Perkumpulan Sampiri, KPHL III, dan melibatkan masyarakat.</p>
6	<p>Mendorong terbentuknya suatu keputusan yang berkekuatan hukum dari pemerintah propinsi atau pemerintah pusat tentang ruang kelola kawasan hutan</p>	<p>Agustus</p>	<p>KPHL, Burung Indonesia dan Perkumpulan Sampiri</p>

	lindung Sahendarumang berdasarkan hasil pendataan dan penataan kawasan yang disepakati masyarakat.		
7	Pengadaan bibit 90ambo, sebagai pohon batas hutan asli	September	KPHL, Perkumpulan Sampiri dan melibatkan masyarakat desa.
8	Penanaman pohon batas hutan asli bersama masyarakat.	Oktober	KPHL, Perkumpulan Sampiri dan mengkondisikan melibatkan masyarakat desa.

8. Kegiatan bersama antara UPTD KPHL dan Perkumpulan Sampiri akan diberi judul : PENATAAN KAWASAN HUTAN LINDUNG SAHENDARUMAN II SEBAGAI ACUAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN PENGEMBANGAN PROGRAM PENGELOLAAN KAWASAN YANG LEBIH BAIK, TERARAH, DAN DILAKUKAN BERSAMA-SAMA OLEH SEMUA STAKEHOLDER SECARA BERKESINAMBUNGAN.

Catatan :

- Kepala KPHL tidak berada di tempat sehingga hasil pembahasan belum dapat di finalkan oleh staf yang ada.
- Hasil pembahasan akan dijadikan laporan kepada Kepala KPHL, untuk selanjutnya akan di komunikasikan dengan perkumpulan Sampiri untuk finalisasinya.
- Sampiri akan membuat konsep MoU dengan KPHL.
- KPHL sudah memberikan SK Menhut No. 734/2014, beserta lampirannya berupa peta Kawasan Hutan Lindung Sahendaruman II.

Capaian Hasil

- Kampung-kampung yang ada di Kecamatan Tabukan Selatan sudah memiliki

sesepakatan pengelola sumber daya alam

- Kesepahaman stakeholder di tingkat kabupaten tentang pelestarian hutan lindung Sahendarumang.
- Diterimanya hasil pendataan hutan lindung Sahendarumang dan penataan wilayah administrasi kampung.
- Terbangunnya kesepakatan kerjasama pelaksanaan kegiatan workshop membangun kesepahaman pengelolaan hutan lindung Sahendarumang, pendataan hutan lindung Sahendrumang dan penataan wilayah administrasi kampung, dan diseminasi hasil pendataan dan penataan antara Perkumpulan Sampiri dengan KPHL Wilayah III.

Hambatan

2.1 Pelatihan kelompok masyarakat dalam mengelola SDA

Pelaksanaan

1. Diskusi dengan Yayasan IDEP di Bali

Teknik pertanian permakultur merupakan salah satu alternatif pengelolaan sumber daya alam di kampung yang berada dalam kawasan hutan lindungan Sahendarumang. Tujuan memperkenalkan teknik pertanian ini adalah untuk intensifikasi pemanfaatan lahan pertanian di sekitar pemukiman sehingga dapat meningkatkan produktifitas hasil produksi pertanian. Harapannya, setelah petani memperoleh hasil pertanian yang memadai, maka akan tercipta cara pertanian menetap dengan memaksimalkan pengelolaan lahan yang ada tanpa lagi membuka lahan dalam kawasan hutan.

Sebagai persiapan untuk pelatihan, Perkumpulan Sampiri mengunjungi Yayasan IDEP di Bali pada tanggal 2017. Yayasan IDEP memiliki kapasitas dalam mendampingi dan menerapkan teknik pertanian permakultur. Perkumpulan Sampiri bertemu dengan salah satu staf Yayasan IDEP bapak Wayan Suardana, dan menyampaikan maksud untuk mengundang Yayasan IDEP menjadi fasilitator pelatihan teknik permakultur di Sangihe.

Hasil kunjungan tersebut adalah bahwa Yayasan IDEP bersedia membantu Perkumpulan Sampiri memberikan pelatihan. Untuk itu perkumpulan Sampiri diminta mengirim permohonan kepada Yayasan IDEP.

Menindaklanjuti hasil kunjungan, pada tanggal perkumpulan Sampiri menyampaikan proposal pelatihan kepada Yayasan IDEP. Beberapa waktu kemudian Yayasan IDEP mengirim konsep pelatihan beserta rincian pembiayaan. Setelah mempelajari konsep dan berkonsultasi dengan Burung Indonesia, maka disimpulkan tawaran pekerjaan dari Yayasan IDEP belum bisa dipenuhi karena jumlah dana yang diminta melebihi alokasi dana yang disiapkan dalam program.

2. Pelatihan Tematik Arahkan Strategi 3 Bagi Mitra CEPF di Bali

Salah satu kegiatan peningkatan kapasitas bagi mitra wallacea dalam pelatihan permakultur yang dilaksanakan oleh Yayasan IDEP. Perkumpulan Sampiri mengutus 2 orang peserta yaitu Roland Tampilang (Perkumpulan Sampiri dan Sem Tamasegho (Tasumaro)). Harapannya setelah mengikuti pelatihan, hasil pelatihan akan menjadi bahan pembelajaran di lokasi-lokasi proyek.

Pelatihan dilaksanakan tanggal 6-10 November 2017 bertempat di Yayasan IDEP Bali, dihadiri oleh 9 Mitra Wallace yaitu 2 orang dari Penabuluh, 3 orang dari Burung Indonesia, 1 orang dari Yepal, 1 orang dari Perkumpulan Sampiri, 1 orang dari Kelompok Tasumaro (Petani Sangihe), 1 orang dari Perkumpulan Salanggar, 1 orang dari LPPM Maluku, 1 orang dari YPPM Maluku, dan 1 orang dari WTM Flores.

Hari senin Tanggal 6 November 2017, pelatihan bertempat di pondok pembelajaran di Yayasan IDEP. Kegiatan yang dilaksanakan :

- Pendaftaran peserta yang difasilitasi oleh Ibu Rivia Dian dari Yayasan Pena Buluh
- Pembagian modul dan training kit, pengisian baseline pengetahuan peserta, Explorasi harapan terhadap pelatihan, eksplorasi pemahaman atas masalah – masalah yang terjadi dalam lingkungan masing – masing, dan dilanjutkan dengan materi pelatihan pengertian, prinsip dan etika permakultur, penetapan zonasi dalam permakultur, peta dan bagian – bagiannya, pembuatan peta zonasi, Konsep pola alam dan desain dalam permakultur, diskusi dan evaluasi, yang difasilitasi oleh Ibu

Sayu dari Yayasan Idep.

Hari Selasa, 7 November 2017, pelatihan bertempat di pondok pembelajaran di Yayasan IDEP. Kegiatan yang dilaksanakan :

- Riview materi, dilanjutkan dengan materi pelatihan komponen permakultur dan metode implementasinya, sistem rumah sehat dalam permakultur, sistem penyimpanan dan penyaringan air, pembuatan sistem penyimpanan dan penyaringan air sederhana, cara pengukuran dan pengetesan PH tanah dan pemulsaan untuk menjaga kelembaban tanah, sistem rehabilitasi tanah, pemahaman tentang jenis – jenis kompos, diskusi dan evaluasi. Kegiatan difasilitasi oleh Ibu Sayu dari Yayasan Idep.

Hari Rabu, 8 November 2017, pelatihan bertempat di Yayasan IDEP. Kegiatan yang dilaksanakan :

- Riview materi, dilanjutkan dengan materi pembuatan kompos padat dan cair, pembenihan dan pembibitan yang baik, sistem PHT dan pestisida alami dari bahan lokal, taknologi tepat guna dan cara pembuatannya dan briefing perencanaan kunjungan lapangan. Kegiatan difasilitasi oleh Sayu dan Wayan dari Yayasan IDEP.

Hari Kamis, 9 November 2017, pelatihan dilaksanakan di pondok pertemuan Kelompok Biogas dan Kelompok DAS di Desa Yehembang Kauh, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana. Kegiatan yang dilaksanakan :

- Perkenalan dengan kelompok Biogas dan Kelompok Das yang difalitasi oleh I.B Putu Wahyu Permana dari Yayasan IDEP.
- Sistem perencanaan permakultur dalam suatu wilayah (dusun, desa, perumahan) difasilitasi oleh Putu Bawa dari Yayasan IDEP.
- Sharing pengalaman dengan kelompok biogas yang difasilitasi oleh Ketua Kelompok Dewa Putu Prabawa.
- Sharing pengalaman dengan kelompok DAS yang difasilitasi oleh ketua kelompok Iketut Yasa.
- Diskusi dengan Kepala Desa Ketut Mustika tentang kolaborasi pelaksanaan program kelompok masyarakat dengan program desa setempat.

- Mengunjungi lokasi biogas yang di pandu oleh ketua kelompok biogas. Hari Jumat, 10 November 2017, pelatihan bertempat di pondok pembelajaran di Yayasan IDEP. Kegiatan yang dilaksanakan :
 - Evaluasi dan review kunjungan lapangan difasilitasi oleh Doni dari Yayasan IDEP.
 - Evaluasi dan diskusi program CEPF dengan mitra dan RIT difasilitasi oleh Andi Faizal Alwi dari Burung Indonesia.
 - Pengisian post test dan penutupan kegiatan difasilitasi oleh Paul Mario Ginting dari Yayasan Pena Buluh.
 - Pembagian sertifikat pelatihan oleh Doni dari Yayasan IDEP.

3. Pelatihan pengembangan permakultur di kampung Bukide

Kegiatan pelatihan pengembangan permakultur dilaksanakan tanggal 4 Desember 2017, dibuka oleh Sem Tamasegho ketua kelompok Tasumaro. Pelatihan dihadiri oleh anggota kelompok sebanyak 17 orang (17 Laki-laki). Dalam kegiatan pelatihan pengembangan permakultur dipandu oleh Roland Tampilang dari Perkumpulan Sampiri.

Materi-materi yang disampaikan yaitu :

1. Pengenalan permakultur
2. Design kebun permakultur
3. Identifikasi dan rehabilitasi tanah
4. Pembuatan pupuk organik dan PHT
5. Rumah, air dan pengolahan limbah
6. Teknologi tepat guna
7. Pembenihan dan pembibitan
8. Praktek pembuatan pupuk kompos cair, MOL (Z.P.B) dan pembuatan pestisida alami.

Dalam kegiatan praktek, kelompok dan masyarakat menghasilkan 100 Liter pupuk kompos cair, 10 Liter MOL (Z.P.B) dan 10 Liter Pestisida alami.

4. Pelatihan Permakultur di Kampung Malamenggu

Pelatihan dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2018 yang difasilitasi oleh

Roland D. Tampilang dan Sem Hard Tamasegho. Pelatihan dihadiri oleh 16 orang (14 Laki-laki dan 2 Perempuan).

Pelatihan dibuka oleh J. R. Pontoh dan sambutan kegiatan pelatihan oleh S. Pontoh selaku pejabat Kapitalaung Malamenggu. Materi – materi yang disampaikan yaitu:

1. Pengenalan permakultur
2. Design kebun permakultur
3. Teknologi tepat guna
4. Identifikasi dan rehabilitasi tanah
5. Pembuatan pupuk organik dan PHT
6. Pembenihan dan pembibitan
7. Rumah, air dan pengolahan limbah

5. Pelatihan Permakultur di Kampung Pelelangeng

Pelatihan dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2018 dihadiri oleh 32 orang (23 Laki-laki dan 9 Perempuan). Kegiatan difasilitasi oleh Roland D.

Tampilang, Nathael D. Piara, dan Saddam Onthoni.

Pembukaan dan sambutan kegiatan pelatihan oleh S. Kundimang selaku pejabat Kapitalaung Pelelangeng. Materi – materi yang disampaikan yaitu :

1. Pengenalan permakultur
2. Design kebun permakultur
3. Teknologi tepat guna
4. Identifikasi dan rehabilitasi tanah
5. Pembuatan pupuk organik dan PHT
6. Pembenihan dan pembibitan
7. Rumah, air dan pengolahan limbah

6. Pelatihan Permakultur di Kampung Kulur 1

Pelatihan dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2018 bertempat di Balai

<p>Kampung Kulur 1. Pelatihan dihadiri oleh 17 orang (15 Laki-laki dan 2 Perempuan), difasilitasi oleh Roland D. Tampiang dan Samsared Barahama.</p> <p>Doa pembukaan oleh G. Simon Sekretaris Kampung Kulur I. Pembukaan dan sambutan oleh Ibu A. Marthin Pejabat Kapitalaung Kulur I, selanjutnya arahan dari George L. Pontoh dan Samsared B. Barahama.</p> <p>Materi – materi yang di sampaikan yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengenalan permakultur 2. Design kebun permakultur 3. Teknologi tepat guna 4. Identifikasi dan rehabilitasi tanah 5. Pembuatan pupuk organik dan PHT 6. Pembenihan dan pembibitan 7. Rumah, air dan pengolahan limbah
<p>Capaian Hasil</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terjadi peningkatan kapasitas bagi 2 orang pelatih teknik pertanian permakultur. - Telah dilakukan pelatihan teknik pertanian permakultur di Kampung Bukide. - Telah dilakukan pelatihan teknik pertanian permakultur di Kampung - Telah dilakukan pelatihan teknik pertanian permakultur di Kampung - Telah dilakukan pelatihan teknik pertanian permakultur di Kampung - Sebanyak 72 orang telah mengetahui teknik pertanian permakultur.
<p>Hambatan</p>

2.2 Pembuatan demplot permakultur

<p>Pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan demplot permakultur di Kampung Bukide <p>Pembangunan demplot permakultur di kampung Bukide dilaksanakan pada tanggal 5 - 6 Desember 2017 oleh kelompok dan masyarakat.</p> <p>Pekerjaan yang dilakukan tanggal 5 Desember 2017 adalah:</p>

1. Membuat desain demplot permakultur.
2. Pembangunan rumah produksi pupuk kompos.
3. Pembangunan rumah pembibitan dan wadah pembibitan.

Pekerjaan yang dilakukan tanggal 6 Desember 2017 adalah:

1. Melanjutkan pembangunan rumah produksi kompos.
2. Pembangunan rumah produksi pembibitan.
3. Pembuatan wadah pembibitan.
4. Identifikasi kesuburan tanah menggunakan alat tes kesuburan tanah.
5. Membangun desain teras kebun.
6. Penaburan cacahan batang pisang dan daun hijau di tengah bedengan dan menutup dengan sekam.
7. Membuat pembibitan 10 jenis tanaman (tomat, cabe besar, cabe kecil, kacang buncis, terong, timun, sawi, bayam merah, bayam hijau, rosella).
8. Membangun contoh media tanam vertikal garden.

2. Pembangunan demplot permakultur di Kampung Malamenggu

Pembangunan demplot dilaksanakan pada tanggal 8-9 Februari 2018 difasilitasi oleh Roland D. Tampilang dan Sem Hard Tamasegho.

Hari Kamis, 08 Februari 2018, dihadiri oleh 17 orang (15 Laki-laki dan 2 Perempuan).

Kegiatan yang dilakukan:

1. Pembersihan lokasi demplot
2. Desain demplot
3. Pembuatan terasering dilokasi demplot menggunakan bingkai A
4. Rehabilitasi tanah

Hari Jumat 09, Februari 2018, dihadiri oleh 20 orang (17 Laki-laki dan 3 Perempuan)

Kegiatan yang dilakukan:

1. Pembuatan pupuk kompos cair

Pembuatan pupuk meliputi persediaan alat dan bahan berupa tong 150

L, batang pisang, daun legume, rumput teki, dedak, air, dan gula pasir.

Proses pembuatan pupuk:

Cacahan batang pisang, daun legume, rumput teki, gula pasir dan dedak dimasukan kedalam wadah, diberi air sampai wadah penuh dan diaduk sampai semua campuran tercampur, kira-kira 15 menit pengadukan.

2. Pembuatan pestisida alami

Penyiapan alat dan bahan berupa galon 10 L, daun sirsak, bawang putih, air, dan telur.

Proses pembuatan pestisida :

Daun sirsak dan bawang putih dihaluskan dan dimasukan kedalam galon, masukan telur, dan air hingga galon penuh. Galon ditutup rapat-rapat.

3. Pembuatan zat perangsang bunga dan buah (Z.P.B.B)

Penyiapan alat dan bahan berupa galon 10 L, selang 0,5 mm, lakban hitam, botol bekas, buah maja, gula pasir, dan air.

Proses pembuatan Z.P.B.B:

Isi buah maja dihaluskan, dimasukan kedalam galon, masukan gula pasir dan diberi air hingga galon penuh. Tutup galon dilubangi dan masukan selang kedalam galon, sisi antara selang dan tutup galon diberi lakban hitam, ujung selang satunya dimasukan ke botol yang berisi air, agar gas selama proses fermentasi bisa keluar melalui selang dan supaya tidak ada udara yang masuk kedalam galon.

4. Pembibitan benih cabe, tomat, sawi, dan terong

Pembibitan benih diawali dengan pencampuran pupuk kandang dan tanah dengan perbandingan 2 : 1, setelah pupuk kandang dan tanah tercampur, tanah dimasukan dalam wadah pembibitan yang telah disediakan. Campuran tanah dan pupuk disiram dengan air secukupnya sampai tanah basah, selanjutnya dilakukan penanaman benih.

3. Pembangunan demplot permakultur di Kampung Pelelangeng

Pelaksanaan pembuatan demplot permakultur di Kampung Pelelangeng, dilaksanakan pada tanggal 25-27 Januari 2018, difasilitasi oleh Roland D. Tampilang dan Sem Hard Tamasegho.

Kegiatan pada Kamis 25, Januari 2018, dihadiri oleh 18 orang (15 Laki-laki dan 3 Perempuan)

Kegiatan yang dilakukan:

1. Pembersihan lokasi demplot, pembersihan lahan meliputi pemangkasan rumput di lokasi yang akan dijadikan demplot.
2. Pencarian bahan pembangunan rumah pupuk kompos dan rumah pembibitan, berupa balok, papan, bambu, patok/tiang (patok/tiang yang digunakan adalah pohon sagu baru yang sudah tua).
3. Pembangunan rumah pupuk dan rumah pembibitan

Kegiatan pada Jumat, 26 Januari 2018, dihadiri oleh 23 orang (15 Laki-laki dan 8 Perempuan)

Kegiatan yang dilakukan:

1. Desain teras kebun, desain teras kebun dilakukan oleh masyarakat dengan menggunakan pola alam.
2. Pembuatan bedengan/teras dan rehabilitasi tanah kebun. Setelah bedengan/teras didesain, dilanjutkan dengan penggemburan tanah kebun dan penimbunan cacahan batang pisang dan daun legume dibedengan. Penimbunan cacahan batang pisang dan daun legume bertujuan untuk merehabilitasi kembali tanah kebun
3. Pembibitan benih cabe, jagung, tomat, sawi, dan terong. Pembibitan benih diawali dengan pencampuran pupuk kandang dan tanah dengan perbandingan 2 : 1, setelah pupuk kandang dan tanah tercampur dilakukan pemberian tanah di wadah pembibitan yang telah disediakan. Campuran tanah dan pupuk disiram dengan air secukupnya sampai tanah basah, selanjutnya dilakukan penanaman benih.

Kegiatan pada Sabtu, 27 Januari 2018, dihadiri oleh 35 orang (27 Laki-laki dan 8 Perempuan).

Kegiatan yang dilakukan:

1. Pembuatan pupuk kompos cair. Pembuatan pupuk meliputi persediaan alat dan bahan berupa tong 150 L, batang pisang, daun legume, rumput teki, dedak, air, dan gula pasir.

Proses pembuatan pupuk :

Cacahan batang pisang, daun legume, rumput teki, gula pasir dan dedak dimasukan kedalam wadah yang disediakan, diberi air sampai wadah penuh dan diaduk sampai semua campuran tercampur, kira 15 menit pengadukan.

2. Pembuatan pestisida alami. Penyiapan alat dan bahan berupa galon 10 L daun sirih, bawang putih, air, dan telur.

Proses pembuatan pestisida :

Daun sirih dan bawang putih dihaluskan dan dimasukan kedalam galon, masukan telur, dan air hingga galon penuh. Galon ditutup rapat – rapat.

3. Pembuatan zat perangsang bunga dan buah (Z.P.B.B). Penyiapan alat dan bahan berupa galon 10 L, selang 0,5 mm, lakban hitam, botol bekas, buah maja, gula pasir, dan air.

Proses pembuatan Z.P.B.B :

Isi buah maja dihaluskan, dimasukan kedalam galon, masukan gula pasir dan diberi air hingga galon penuh. Tutup galon dilubangi dan masukan selang kedalam galon, sisi antara selang dan tutup galon diberi lakban hitam, ujung selang satunya dimasukan ke botol yang berisi air, agar gas selama proses fermentasi bisa keluar melalui selang dan supaya tidak ada udara yang masuk kedalam galon

4. Pembangunan demplot permakultur di Kampung Kulur 1
Pembuatan demplot di kampung Kulur 1 dilakukan dengan kegiatan pembersihan lahan. Selanjutnya proses pembibitan dan penanaman

difasilitasi oleh kampung.

5. Kunjungan Bupati Kepulauan Sangihe di demplot permakultur Kampung Bukide

Bupati berkunjung ke demplot permakultur kampung Bukide dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2017 bertepatan dengan kegiatan me'daseng yang rutin dilakukan oleh Bupati setiap bulan. Pada kesempatan tersebut bupati mencoba melakukan praktek pembuatan pupuk kompos cair dan menanam di lahan permakultur yang sudah disiapkan. Bupati juga menyaksikan demonstrasi pengujian kesuburan tanah dengan alat indikator sederhana yang dibuat oleh kelompok Tasumaro.

Bupati sangat terkesan dengan inovasi pertanian yang dilakukan oleh kelompok Tasumaro, dan merekomendasikan kepada dinas terkait, penyuluh pertanian dan kampung sekitar untuk belajar di kampung Bukide.

5. Monitoring pelaksanaan demplot permakultur di kampung Bukide

- Tanggal 6 Desember 2017, pembibitan tanaman tomat, cabe kriting, cabe kecil, kacang boncis, terong, timun, sawi, bayam merah, bayam hijau, dan rosela.
- Tanggal 16 Desember, penanaman bibit cabe kriting, cabe kecil, tomat, rosela, timun, bayam merah, bayam hijau, kacang boncis, terong dan sawi diteras dan vertikal garden. Adapun anggota kelompok tasumaro mengambil bibit untuk ditanam di halaman rumah dan di kebun masing-masing. Untuk pupuk kompos, anggota kelompok tasumaro dan masyarakat yang berprofesi sebagai petani menggunakan pupuk kompos cair pada aktifitas pertanian. Pemupukan dilakukan 2 kali dalam seminggu, pemupukan dilakukan pagi sebelum jam 9 pagi atau sore setelah jam 5 sore.
- Tanggal 8 Januari 2018, sawi dipanen oleh kelompok tasumaro, hasil sawi yang dipanen tidak dijual tetapi dikonsumsi pribadi. Untuk jenis

tanaman lain belum menunjukkan hasil.

- Tanggal 6 Februari, tanaman bayam merah dan bayam hijau dipanen oleh kelompok tasumaro, sebagian hasil panen dijual dipasar manalu dan sebagian dikonsumsi.
- Tanggal 24 Februari 2018, tanaman tomat dipanen mulai tanggal 16 Februari sampai sekarang. Hasil panen dijual kepasar, jenis tanaman tomat yang menggunakan pupuk kompos memiliki hasil buah yang segar, sehat dan tidak terserang penyakit/cacat pada buah tomat. Pada tanaman kacang boncis, cabe kriting, cabe kecil belum menghasilkan buah sampai saat ini.
- Tanggal 7 maret 2018, tanaman tomat kembali dipanen oleh kelompok tasumaro , hasil panen sebagian dijual dan sebagian dikonsumsi sendiri. Panen awal tomat sampai saat ini berjumlah 30 kg. Untuk panen tomat terakhir , hasilnya akan dijadikan benih kembali.
- Pada tanaman timun, terong dan cabe sudah memiliki buah tetapi belum siap panen

6. Monitoring pelaksanaan demplot permakultur di kampung Malamenggu

- Tanggal 16 februari 2018, tanaman sawi baru menunjukkan akan bertumbuh. Tanaman cabe, terong, tomat belum bertumbuh. Dalam kesepakatan kelompok kepok untuk melakukan pemeliharaan bibit dipercayakan kepada ketua kelompok kepok.
- Tanggal 6 maret 2018, tanaman sawi rusak atau kering, dikarenakan tidak adanya perawatan penyiraman secara teratur oleh ketua kelompok ataupun anggota kelompok dalam tahap pembibitan. Tanaman cabe, terong dan tomat, baru 3-4 pohon yang bertumbuh, yang sisanya masih dalam bentuk biji kering, karena tidak ada proses penyiraman oleh ketua maupun anggota sehingga tanaman tersebut tidak tumbuh. Pada saat itu kami melakukan penyiraman pada wadah

pembibitan. Pada pupuk kompos cair tidak dilakukan pengadukan secara teratur oleh kelompok kepok. Menurut informasi dari masyarakat kampung malamenggu, satu minggu sebelum kami melakukan monitoring, ketua kelompok telah berangkat kenabire unruk bekerja, kami coba menghubungi anggota kelompok dan kapitalaung kampung malamenggu, membicarakan kejelasan pengelola demplot yang berkedudukan dilahan milik kampung. Salah satu anggota mengatakan, untuk teknik pertanian permakultur anggota kelompok telah mempraktekannya dikebun pribadi masing-masing, sehingga demplot yang disepakati tidak diperhatikan oleh kelompok. Tetapi kami berusaha agar segala fasilitas yang diberikan ini difungsikan. Salah satu masyarakat kampung malamenggu Muslin Mirontoneng mengatakan bahwa beliau siap menyediakan lahan untuk dibuat demplot permakultur.

7. Monitoring pelaksanaan demplot permakultur di kampung Pelelangeng

- Tanggal 9 Februari 2018, penanaman bibit sawi diteras, ada juga anggota kelompok mengambil bibit sawi untuk ditanam di halaman rumah dan dikebun.
- Tanggal 12 Februari 2018, Pembagian pupuk kompos cair kepada anggota kelompok dan petani. Pembagian pupuk kompos cair bertujuan, supaya masyarakat kampung pelelangeng khususnya yang berprofesi sebagai petani, agar menggunakan pupuk kompos cair dalam aktifitas pertanian sehingga mengurangi pengeluaran untuk membeli pupuk.
- Tanggal 16 Februari 2018, penanaman bibit tomat, terong, dan cabe diteras demplot. Untuk bibit cabe, tomat dan terong, beberapa anggota kelompok mengambil bibit untuk ditanam di halaman rumah dan dikebun. Untuk penyiraman pupuk kompos dilakukan penyiraman 2 kali dalam seminggu, penyiraman dilakukan pagi sebelum jam 9 atau sore sesudah jam 5 sore. Bibit terong ada juga ditanam dikebun masyarakat, di halaman rumah masyarakat, di halaman PAUD dan di halaman Kantor

<p>kampung Pelelangeng.</p> <ul style="list-style-type: none">- Tanggal 7 Maret 2018, jenis tanaman tomat mengalami kerusakan pertumbuhan akibat derasnya curah hujan, dan cuaca yang tidak menentu. Tanaman yang pertumbuhannya baik sampai saat ini adalah jenis tanaman terong dan cabe. Pada tanaman sawi, mengalami kerusakan pada daun yang diakibatkan oleh serangan hama belalang, untuk mengurangi jumlah serangan hama belalang, dilakukan penyemprotan pestisida alami pada tanaman sawi. Pupuk kompos sampai saat ini sudah hampir habis, karena banyak masyarakat atau petani yang memerlukan pupuk kompos. Untuk mempertahankan stok pupuk kompos, pemerintah kampung pelelangeng dan kelompok johar, berusaha untuk memproduksi lagi pupuk kompos. Pada tanggal 23 februari 2018 ketua kelompok membibitkan kembali sawi di rumah pembibitan.
<p>Capaian Hasil</p> <ul style="list-style-type: none">- 4 kelompok di 4 kampung sudah dapat mempraktekan cara membuat lahan dengan teknik permakultur.
<p>Hambatan</p>

IV. PERUBAHAN

a. Peningkatan perubahan terhadap KBA

NAMA KBA	Bentuk Peningkatan Pengelolaan KBA	Luas KBA yang Mendapatkan Peningkatan Pengelolaan	Dokumen Verifikasi
Sahendarumang	Hutan Lindung yang akan didorong pengelolaannya dalam skema perhutanan sosial	Kurang lebih 1.667,26	Belum ada usulan dalam bentuk dokumen namun menjadi rekomendasi diseminasi hasil pendataan kawasan hutan lindung Sahendarumang.

b. Perlindungan Kawasan

Nama Kawasan	Bentuk Perlindungan Kawasan	Luas Kawasan/Tahun Penetapan	Dokumen Verifikasi
Hutan Lindung Sahendrumang	Hutan Lindung	3.487,82	Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor:734/Menhut/II/Tahun 2014 Tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sulawesi Utara

c. Penerima Manfaat

Karakteristik penerima manfaat

Nama Komunitas	Jenis Komunitas	Ukuran
Masyarakat Kampung Bukide	Masyarakat lokal	251 sampai 500 jiwa

Masyarakat Kampung Malamenggu	Masyarakat lokal	500 jiwa – 1000 jiwa
Masyarakat Kampung Pelelangeng	Masyarakat lokal	251 sampai 500 jiwa

Jumlah Penerima Manfaat

Jenis Manfaat	Jumlah Penerima Manfaat (Laki-Laki)	Jumlah Penerima Manfaat Perempuan
Pelatihan	59	19

d. Regulasi/Kebijakan lokal

Nama Regulasi/Kebijakan	Ruang Lingkup (Nasional, lokal, desa)	Toiik	Hasil yang diharapkan
Peraturan Kampung	Kampung	Peraturan Kampung Tentang Tata Kelola Ruang Kampung Bukide	Diintegrasikan dalam RPJM dan RKP sebagai rencana operasional
Peraturan Kampung	Kampung	Peraturan Kampung Tentang Tata Kelola Ruang Kampung Malamengg	Diintegrasikan dalam RPJM dan RKP sebagai rencana operasional
Peraturan Kampung	Kampung	Peraturan Kampung Tentang Tata Kelola Ruang Kampung Pelelangeng	Diintegrasikan dalam RPJM dan RKP sebagai rencana operasional
Peraturan Bupati	Kabupaten	Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengembangan Pertanian Organi di Kabupaten Kepulauan Sangihe	Dijabarkan dalam kebijakan program pemerintah Kabuapten Kepulauan Sangihe

e. Jaringan Kerja

Nama Jaringan/Kemitraan	Ruang Lingkup (Nasional, Lokal)	Tujuan Penetapan	Tahun Penetapan

Bentang Alam Produktif

Nama Bentang Alam Produktif	Bentuk Peningkatan Pengelolaan Bentang Alam Produktif	Luas Bentang Alam Produktif yang Mendapatkan Peningkatan Pengelolaan	Dokumen Verifikasi

IV. PEMBELAJARAN DAN REKOMENDASI

1. Kegiatan pertanian dengan sistem permakultur menjadi salah satu solusi atas masalah pertanian di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2. Kebun percontoh permakultur di kampung Bukide merupakan suatu inovasi pertanian dan menjadi rujukan bagi dinas terkait, penyuluh, dan kampung tetangga, untuk belajar pertanian dengan teknik permakultur.
3. Hasil penataan hutan lindung Sahendarumang menjadi referensi stakeholder dalam mengembangkan program dan kebijakan.
4. Pengelolaan kawasan hutan lindung Sahendarumang dengan melibatkan pemerintah dan masyarakat kampung menjadi solusi atas konflik tata batas yang sudah terjadi selama ini.
5. Mengintegrasikan program pelestarian hutan lindung Sahendarumang kedalam RPJM dan Rencana Kerja Pemerintah kampung adalah sebuah strategi yang dapat melestarikan hasil kegiatan proyek dan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan.
6. Analisis isu:

Isu	Keberhasilan/ Kurang Berhasil	Faktor Penyebab	Dampak	Rekomendasi
Hasil: a. Perubahan Pengetahuan	Telah terjadi perubahan pengetahuan masyarakat kampung tentang hutan lindung Sahendarumang.	Komuniasi dan penjelas yang baik dan dapat diterima.	Adanya dukungan pemerintah kampung dan masyarakat dalam pengelolaan hutan lindung.	
b. Perubahan Sikap	Masyarakat dapat menerima batas	Masyarakat mengerti tentang fungsi dari hutan	Masyarakat terbuka dan menerima kegiatan pelestarian hutan lindung	

c. Perubahan Perilaku	hutan lindung dan tidak lagi menjadikannya sebagai konflik tata batas Masyarakat mau bersama-sama melakukan kegiatan penataan batas hutan lindung	lindung. Masyarakat ingin mengetahui keberadaan hutan lindung di desanya.	Sahendruang. Masyarakat mau ikut terlibat dalam kegiatan dan mau memasukan program pelestarian hutan lindung dalam RPJM dan RKP.	
Proses: a. Perencanaan b. Pelaksanaan	Kurang berhasil Kurang berhasil	Tingkat pengetahuan dan kemampuan masyarakat masih kurang dalam inovasi kegiatan	Kegiatan pelestarian masih kurang inovatis, dan keterampilan pengelolaan kegiatan yang masih rendah.	Perlu dilakukan pendampingan yang intensif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan

7. Saat ini pemerintah kampung dan masyarakat sudah dapat menerima keberadaan hutan lindung Sahendarumang. Untuk selanjutnya perlu dilakukan pengelolaan yang berkesinambungan pada kawasan hutan lindung yang beririsan dengan area yang digarap oleh masyarakat.
8. Mendorong skema pengelolaan perhutanan sosial untuk mengakomodir keberadaan area yang dikelola oleh masyarakat sehingga masyarakat mendapat legitimasi mengelola lahan dalam kawasan dengan tetap menjaga fungsi lindung tanpa mengubah status kawasan.

Bagian Kedua
RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

IV. STATUS KEUANGAN

Nama Proyek	:	Proyek Pelestarian Hutan Lindung Sahendarumang Untuk Konservasi Jenis Terancam Punah Dan Mendorong Pengelolaan Jasa Lingkungan Secara Berkelanjutan
Hibah Burung/CEPF	:	Rp. 199.655.000 <i>(seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah)</i>
Pencairan Dana Tahap Pertama	:	Rp 42.157.500 <i>(empat puluh dua juta seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)</i>
Pencairan Dana Tahap kedua	:	Rp 49.183.750 <i>(empat puluh sembilan juta seratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)</i>
Pencairan Dana Tahap ketiga	:	Rp 59.896.500 <i>(lima puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah)</i>
Dana terpakai	:	Rp. 199.196.547 <i>(seratus sembilan puluh sembilan juta seratus sembilan puluh enam ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah)</i>
Saldo	:	Rp 458.453 <i>(empat ratus lima puluh delapan ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah)</i>
